

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP *EARNINGS MANAGEMENT* DI BANK UMUM SYARIAH

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

TIYANSI KURNIA ASIH

NIM. 1705046102

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami memberikan bimbingan, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Tiyansi Kurnia Asih

Nim : 1705046102

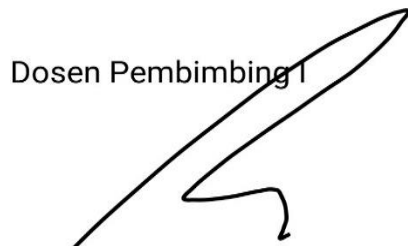
Judul : **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT DI BANK UMUM SYARIAH.**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

NIP. 19700410 199503 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JL. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Tiyansi Kurnia Asih
NIM : 1705046102
Judul : **Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Earnings Management* di Bank Umum Syariah.**

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan telah lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 29 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 12 Juli 2021

Ketua Sidang

Warno, SE., M.Si.

NIP.19830721 201503 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji Utama I

Rahman El Junusi, SE., MM.

NIP. 1969118 200003 1 001

Penguji Utama II

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.

NIP. 19590215 198503 1 005

Pembimbing I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing II

Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004



MOTTO



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya tulis ini untuk:

Ibu dan Ayah

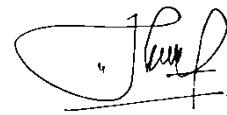
Tiada kata yang mampu menggambarkan bagaimana tulusnya kasih dan sayang kedua orangtua kepada saya. Segala bentuk perjuangan dan pengorbanan untuk hidup saya yang tak ternilai harganya. Kepada ibunda tercinta almh. Ibu Daliyem dan ayahanda tersayang Bapak Sukisno, saya mengucapkan terimakasih karena telah menjadi sosok inspiratif dalam hidup saya. Allah SWT yang akan membalas kebaikan dari kedua orangtua saya dengan surga-Nya. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Mei 2021

Deklarator



Tiyansi Kurnia Asih

NIM. 1705046102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah sesuatu hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ء	'	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	zh
ث	ts	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dhammah	u	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliteraisnya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبة = *al-thibb*.

D. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المَطْبُوعَةُ الوَعِيظَةُ = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Laporan keuangan dalam suatu perusahaan dijadikan alat oleh manajemen untuk menarik minat para investor. Seringkali laporan keuangan tersebut dimanipulasi dengan merubah tampilan pada jumlah laba yang seolah-olah terlihat lebih relatif dan stabil yang dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*). Tindakan oportunitis manajemen ini dapat diminimalisir dengan adanya *good corporate governance*. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 3 unsur *good corporate governance* yaitu dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah. Manajemen laba sebagai variabel dependen diproyeksi dengan *discretionary accrual* dengan menggunakan model *jones* yang dimodifikasi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif yang mana data yang digunakan diperoleh dari *annual report* masing-masing bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2019. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kata kunci: *good corporate governance*, manajemen laba, dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah.

ABSTRACT

Financial reports in a company are used as a tool by management to attract investors. Often these financial statements are manipulated by changing the appearance of the amount of earnings that appear to be more relative and stable, which is known as earnings management. This opportunistic management action can be minimized by the presence of good corporate governance. This study was conducted to examine the effect of good corporate governance on earnings management. This study uses 3 elements of good corporate governance, namely the board of commissioners, the audit committee, and the sharia supervisory board. Earnings management as the dependent variable is projected with discretionary accruals using a modified Jones model. This research is included in the type of quantitative research in which the data used are obtained from the annual reports of each Islamic commercial bank registered with the Financial Services Authority for the period 2016-2019. The analysis method used is multiple linear regression. The results showed that the board of commissioners, audit committee and sharia supervisory board had no significant effect on earnings management.

Keywords: *good corporate governance, earnings management, board of commissioners, audit committee, and sharia supervisory board.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT DI BANK UMUM SYARIAH”** dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, kritik dan saran yang membangun, serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si. Akt. CA., CPA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang senantiasa mengingatkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I. selaku wali dosen yang senantiasa memberikan pengarahan kepada penulis selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap dosen UIN Walisongo beserta staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah melayani dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh pihak yang telah membantu di dalam proses penyusunan skripsi ini, yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Akan tetapi, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat untuk masyarakat luas dalam menambah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 8 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Agency.....	6
2. Manajemen Laba.....	7
3. <i>Good Corporate Governance</i>	9
4. Bank Umum Syariah.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Penelitian.....	28
D. Hipotesis.....	28
1. Hubungan Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba.....	29
2. Hubungan Komite Audit terhadap Manajemen Laba.....	30
3. Hubungan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sumber Data.....	33
B. Populasi dan Sampel.....	33

C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran	34
1. Variabel Dependen	34
2. Variabel Independen.....	35
E. Teknik Analisis Data	37
1. Analisis Deskriptif.....	37
2. Analisis Regresi Logistik.....	37
BAB IV ANALISIS DATA	41
A. Gambaran Umum Penelitian	41
B. Pengujian dan Hasil Analisis Data	42
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	42
2. Analisis Regresi Logistik.....	43
C. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	48
1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.....	48
2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah	48
3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah	49
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Keterbatasan Penelitian	51
C. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS Tahun 2016-2019	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian.....	41
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kelayakan Model.....	43
Tabel 4. 4 Hasil Uji <i>-2 Log Likelihood Value</i>	44
Tabel 4. 5 Hasil Uji <i>-2 Log Likelihood Value</i>	45
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	45
Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan.....	46
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	28
--------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama muslim, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang bersifat haram.¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan jumlah perbankan syariah dengan kriteria Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Perkembangan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
BUS				
Jumlah Bank	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1.8869	1.825	1.8875	1.919
UUS				
Jumlah Bank	21	21	20	20
Jumlah Kantor	332	344	354	381
BPRS				
Jumlah Bank	166	167	167	164
Jumlah Kantor	453	441	495	617

Sumber: www.ojk.go.id

¹ Nardi Sunardi, "Kesehatan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR)," *SEKURITAS* 3, no. 2 (2020): 132–47.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat data perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia. Semakin pesat perkembangan jumlah bank di Indonesia, akan berdampak pada persaingan yang cukup ketat sehingga pada akhirnya mendorong bank untuk berpacu meningkatkan kemajuan di dalam kinerja perusahaannya. Kemajuan suatu perusahaan disebabkan dari berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu bank yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam menerapkan *corporate governance*, maka akan mempengaruhi timbulnya skandal keuangan di perusahaan/perbankan.

Skandal kasus keuangan terjadi di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah pada tahun 2019 yaitu terjadinya pembiayaan fiktif yang melibatkan Pelaksana tugas (Plt) Dirut BJB Syariah. Kasus tersebut terjadi tidak hanya sekali, tahun 2013 BJB Syariah juga mengalami kredit bermasalah yang berpotensi tidak tertagih dan merugikan perusahaan sebesar Rp. 76,18 miliar. Pada waktu yang hampir bersamaan, BJB Syariah terlilit *fraud* dengan modus kasus kredit fiktif sebesar Rp. 58,2 miliar ke PT Cipta Inti Pramindo yang disalurkan dari BJB cabang Surabaya. Di tahun 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank BJB cabang Sukabumi perihal pemberian kredit fiktif dengan capaian nilai sebesar Rp. 38,7 miliar.² Selain itu, pada tahun 2015 kasus terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang melakukan aksi pemalsuan dokumen dan penggelapan uang sehingga mengakibatkan kerugian senilai Rp. 50 miliar.³

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis menjadi salah satu faktor pemicu bagi manajemen untuk berlomba-lomba menampilkan nilai terbaik dari perusahaan yang ia pimpin, salah satu caranya dengan menyajikan laporan keuangan yang baik.⁴ Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dalam suatu perusahaan memilih untuk menggunakan konsep *accrual basis* dibandingkan dengan *cash basis*, karena penggunaan konsep *accrual basis* dapat menghasilkan informasi yang cukup akurat mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Penggunaan metode *accrual basis* akan mempermudah manajer perbankan syariah dalam mengelola laba tanpa harus menyeleweng dari aturan Pernyataan Standar Akuntansi

² Bisnis.com, "Skandal Bank BJB Syariah Aher Dalam Jeratan Kredit Fiktif," [www.m.bisnis.com](http://m.bisnis.com/financial/read/20190326/90/904455/skandal-bank-bjb-syariah-aher-dalam-jeratan-kredit-fiktif), 2019, <http://m.bisnis.com/financial/read/20190326/90/904455/skandal-bank-bjb-syariah-aher-dalam-jeratan-kredit-fiktif>.

³ Kompas.com, "Orang Dalam Bermain, Bank Syariah Mandiri Dibobol Rp. 50 Miliar," [www.amp.kompas.com](http://amp.kompas.com), 2015, <http://amp.kompas.com/megapolitan/read/2015/02/02/18582981/Orang.Dalam.Bermain.Bank.Syariah.Mandiri.Dibobol.Rp.50.Miliar>.

⁴ Triana Novitasari, Nur Hisamuddin, and Bunga Maharani, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *JEAM* 18, no. 2 (2019): 85–94.

Kuangan (PSAK) karena sudah menentukan metode akuntansi yang tepat. Jika target laba yang ditentukan tidak sesuai yang diinginkan, maka manajer dapat mengganti komponen-komponen akrual dengan cara mengurangi atau meningkatkan jumlah laba untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. Cara ini akan memperlihatkan perubahan tampilan pada jumlah laba yang seolah-olah akan terlihat lebih relatif dan stabil, sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan serta mendapatkan reaksi yang baik dari pasar. Hal ini merupakan tindakan oportunitis manajemen yang disebut dengan istilah manajemen laba (*earnings management*).⁵

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak atas dasar prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak seharusnya terlibat dalam praktik manajemen laba apapun itu bentuknya. Selain didorong oleh nilai-nilai moral yang kuat, aspek kepatuhan hukum syariah mengharuskan bank syariah untuk memiliki sifat *amanah* (dapat dipercaya) dalam penyusunan laporan keuangan yang memberi informasi dan menjadi landasan bagi pihak-pihak berkepentingan (*shareholder or stakeholder*) dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Zahara dan Veronica (2009), meskipun dengan peraturan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) dalam menyusun laporan keuangan bank, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang mengandung unsur manajemen laba yang dapat menyesatkan pembacanya, di mana secara syariah hal ini juga tidak diperbolehkan (dilarang).⁶

Laju perkembangan entitas keuangan syariah yang terjadi begitu pesat, membutuhkan adanya sistem monitoring dari pihak perbankan untuk mengawasi jalannya kegiatan di semua unit usaha dan mengetahui segala proses berjalannya aktivitas perbankan syariah. Dengan adanya pengawasan tersebut, maka perbankan syariah diharuskan mempunyai lembaga atau orang-orang yang mana bertugas untuk menjalankan fungsi monitoring. Untuk itu, penelitian ini menggunakan unsur-unsur *Good Corporate Governance* yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai sarana pengawas bank syariah. Dewan komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah diberikan kewenangan penuh untuk memantau patuh atau tidaknya karyawan bank syariah terhadap aturan, prosedur serta kebijakan sesuai dengan standar yang berlaku.

⁵ Liya Ermawati and Nia Anggraini, "Pengaruh Komisaris Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)," *Akuntansi Dan Keuangan Islam* 01, no. 01 (2020): 61–70.

⁶ Novy Sulistyoningih and Nur Fadjrih Asyik, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP MANAJEMEN LABA," *Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 3 (2019): 2–20.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis pengaruh *good corporate governance* di Bank Umum Syariah yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap tindakan manajemen laba harus dibuktikan dengan penelitian empiris, sehingga judul dari penelitian ini yaitu **“PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MENDETEKSI PRAKTIK *EARNINGS MANAGEMENT* DI LAPORAN KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, sehingga nantinya dapat diaplikasikan dalam dunia kerja.
2. Bagi akademisi, adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan rujukan dalam mengembangkan ilmu yang terkait dengan pengaruh/hubungan antara dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba di dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.

3. Bagi perbankan syariah, adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sarana pengambilan kebijakan/keputusan yang berhubungan dengan manajemen laba.
4. Bagi khalayak umum, adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba di Bank Umum Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan kemudahan dalam penulisan setiap sub bab penelitian yang terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang sesuai dengan masalah penelitian dan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian pustaka yang digunakan bersumber dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, serta dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode dan pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari analisis deskriptif, uji model regresi, uji asumsi klasik, uji ketepatan model, dan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran penulis terhadap beberapa keterbatasan dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Agency

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan mengenai kondisi perusahaan yang mana pihak manajemen selaku pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai principal menjalin kontrak kerjasama yang dikenal dengan istilah “*nexus of contract*”. Kontrak kerjasama ini berisi tentang kesepakatan-kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi hak dari pemegang saham secara optimal seperti keuntungan yang besar.

Manajemen selaku pihak agen yang menjalankan roda kegiatan perusahaan tentunya dapat menguasai informasi mengenai perusahaan secara maksimal (*full information*), sedangkan pihak prinsipal mempunyai kelebihan dalam hal kekuasaan (*discretionary power*) atau memaksimalkan kekuasaan, sehingga diantara kedua belah pihak ini saling mempunyai kepentingan pribadi (*self-interest*) dalam setiap kebijakan yang akan diputuskan. Adanya ketidaksesuaian kepentingan antara agen dan prinsipal dapat memberi peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunitis manajemen berupa manajemen laba. Informasi penuh yang dimiliki manajemen dapat disalahgunakan untuk menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan.⁷

Di dalam teori agensi dikenal juga adanya informasi tidak seimbang yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi tersebut merupakan dampak dari penyampaian informasi yang tidak seimbang antara manajer dan pemilik modal. Berikut dua bentuk masalah keagenan yang muncul dari perbedaan tujuan antara agen dan prinsipal:

1. *Moral Hazard*

Moral hazard adalah suatu masalah yang terjadi apabila agen tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang mana sudah menjadi kesepakatan dalam kontrak kerja, atau agen melakukan tindakan penyelewengan dari kesepakatan yang telah ditetapkan.

⁷ Ermawati and Anggraini, “Pengaruh Komisaris Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia).”

2. *Adverse Selection*

Adverse selection adalah suatu kondisi yang mana pihak prinsipal tidak dapat mengetahui secara pasti apakah tindakan yang diputuskan oleh agen telah sesuai dengan informasi yang diperoleh prinsipal atau tindakan yang dilakukan oleh agen dinilai sebagai kesalahan dalam menjalankan tugas.

2. Manajemen Laba

Manajemen selaku pengelola perusahaan mempunyai informasi lebih banyak dan lebih dulu tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal sehingga terjadi asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini dijadikan celah bagi manajemen melakukan tindakan manajemen laba dengan cara merubah metode akuntansi yang berorientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Tindakan manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kredibilitas laporan keuangan, akibatnya kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Kualitas laba dikatakan rendah apabila laba yang dilaporkan tidak sesuai dengan laba yang sesungguhnya, sehingga informasi laba yang diperoleh menjadi biasa dan dampaknya dapat menyesatkan investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan.⁸

Lahirnya praktik manajemen laba didasari oleh perilaku *opportunistic* dan *efficient contracting* manajemen. Pada umumnya manajemen laba diasosiasikan dengan *accruals earnings management (AM)*. Seorang manajer mempunyai fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dan opsi-opsi tertentu dalam mencatat transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi. Praktik manajemen laba dapat dilakukan dengan mengambil keuntungan dari efek pilihan akuntansi yang dapat dijadikan dasar keputusan terbaik bagi perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen salah satunya yaitu mengganti suatu metode akuntansi tertentu dari beberapa metode yang dapat dipilih, yang mana telah tersedia dan diakui oleh prinsip akuntansi berterima umum (*Generally Accepted Accounting Principles/GAAP*). Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan yang melakukan tindakan manajemen laba akan mengelola laba mereka dalam batas-batas prosedur akuntansi yang berlaku.⁹

⁸ Kalvarina Sabatini and Putu Sudana, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi," *Akuntansi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 56–69.

⁹ Putu Ery Setiawan and I Made Pande Dwiana Putra, "Keputusan Pemilihan Strategi Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Mengalami Financial Distress Di Indonesia," *JIAB* 14, no. 2 (2019): 196–207.

Menurut Scott (1997) dalam (7950) ada berbagai macam motivasi seorang manajer melakukan manajemen laba, antara lain:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa dalam merencanakan kompensasi atau bonus, manajerial cenderung akan menggunakan metode akuntansi yang dapat memanipulasi laba untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Manajer menggunakan strategi dengan mengolah angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan, sehingga tercapai tingkat kinerja yang dapat memberikan bonus setiap tahun.

2. Kontrak Hutang Jangka Panjang

Strategi manajer untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang dalam waktu dekat yaitu menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Cara ini kemungkinan dapat membantu perusahaan untuk terhindar dari pelanggaran kontrak.

3. Motivasi Politik

Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh dengan tujuan meminimalkan visibilitas, terutama saat periode kemakmuran tinggi. Cara ini ditempuh guna mendapatkan kemudahan fasilitas dari pemerintah.

4. Motivasi Perpajakan

Perusahaan melakukan pengurangan laba salah satu alasan utamanya dikarenakan biaya pajak. Jika nilai laba yang disajikan dalam laporan keuangan diminimalkan, maka perusahaan akan memperoleh besaran pajak yang tidak terlalu tinggi.

5. Pergantian *Chief Executive Officer* (CEO)

CEO berusaha memaksimalkan laba ketika masa kerjanya akan selesai agar mendapatkan bonus yang tinggi. Demikian pula dengan CEO yang memiliki kinerja kurang baik, maksimalisasi laba dilakukan untuk mempertahankan posisi atau mencegah kemungkinan adanya pemecatan.

6. Penawaran Saham Perdana

Saat perusahaan *go public*, calon investor dapat mengetahui nilai perusahaan dari informasi keuangan yang ada dalam prospectus. Agar perusahaan terlihat mempunyai citra yang baik dimata investor, maka manajer melakukan upaya dengan menaikkan laba yang disajikan untuk mempengaruhi keputusan calon investor.

Scott (2007) juga menyebutkan terdapat 4 (empat) pola manajemen laba:

a. Taking a bath

Taking a bath adalah teknik manajemen laba yang dijalankan dengan memainkan angka-angka laba dalam laporan keuangan sehingga pada saat periode berjalan laba terlihat lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan laba pada saat periode sebelum atau sesudahnya.

b. Income Minimization

Income minimization yaitu teknik manajemen laba yang dijalankan dengan cara pada saat periode berjalan laba terlihat lebih rendah dibandingkan dari laba sebenarnya dalam laporan keuangan.

c. Income Maximization

Income maximization yaitu teknik manajemen laba yang dijalankan dengan cara pada saat periode berjalan laba terlihat lebih tinggi dibandingkan dari laba sebenarnya dalam laporan keuangan.

d. Income Smoothing

Income smoothing (perataan laba) adalah teknik manajemen laba yang dijalankan dengan memperlihatkan laba pada laporan keuangan dari periode ke periode relatif konsisten.

3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG ini berhubungan dengan kepercayaan (*trust*) baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG dapat menciptakan persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh sebab itu, GCG sangat penting untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan perkembangan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Pemerintah dalam birokrasinya saat ini sedang berusaha menerapkan *good governance* untuk menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: suatu proses dan struktur yang digunakan dalam organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang

dengan tetap mengindahkan kepentingan *stakeholder* lainnya, sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah unsur fundamental di industri perbankan karena tantangan dan risiko yang akan ditempuh oleh industri perbankan semakin meningkat. Konsistensi dalam pelaksanaan GCG akan memberikan nilai maksimal bagi perusahaan, memperkuat posisi daya saing perusahaan, mengelola risiko dan sumber daya secara lebih efektif dan efisien yang dapat memperkuat rasa kepercayaan dari pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga bank syariah dapat terus beroperasi dan tumbuh berkelanjutan dalam jangka panjang. Bank syariah memegang komitmen penuh dalam menerapkan GCG di seluruh tingkatan organisasi yang bertumpu kepada peraturan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG.¹⁰

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG: 2006) adalah acuan bagi perusahaan untuk menerapkan GCG dalam rangka, sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi kinerja perusahaan dengan pengelolaan yang seimbang berdasarkan asas tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Meningkatkan pemberdayaan fungsi dan kualitas organ yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Menanamkan nilai moral kepada pemegang saham, anggota Dewan Direksi dan anggota Komisaris agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pengambilan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kesadaran etika dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
5. Meningkatkan nilai dan citra perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan, baik itu *stakeholders* maupun *shareholders*.
6. Mengoptimalkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga akan berdampak pada *trust* (kepercayaan) pasar terhadap perusahaan yang akan meningkatkan arus investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia bersumber dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu

¹⁰ Putri Indar Dewi, "PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH," *AL-TSARWAH* 3, no. 2 (2020): 1–15.

Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), dan Keadilan (*Fairness*). Bank syariah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip GCG ini telah diimplementasikan di setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya demi tercapainya kesinambungan usaha (*sustainability*). Penjabaran dari kelima prinsip GCG tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi merupakan suatu keterbukaan yang sudah seharusnya dijalankan oleh setiap aspek di perusahaan dalam kaitannya untuk memenuhi kepentingan publik atau pemegang saham. Transparansi sebagai salah satu prinsip GCG merupakan bentuk komitmen perusahaan secara terbuka mengungkapkan data yang terpercaya kepada para pemangku kepentingan. Transparansi ini erat kaitannya dengan keterbukaan pengungkapan informasi termasuk dalam pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi relevan dan material tentang perusahaan. Pengungkapan informasi akan berpengaruh terhadap efisiensi pasar yang menyangkut kinerja korporasi secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan *comparable*. Prinsip ini digunakan untuk meminimalisir potensi munculnya benturan kepentingan (konflik interest). Penerapan prinsip transparansi yakni berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim digunakan dan diterima secara umum, misalnya PSAK, GAAP dan lainnya, memberitahukan info keuangan dan info lain yang akan berpengaruh terhadap kinerja korporasi secara akurat dan tepat waktu serta memberikan kemudahan akses bagi pemegang saham jika membutuhkan informasi penting pada saat dibutuhkan. Prinsip transparansi tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh entitas atas kinerja berupa keberhasilan maupun ketidakmampuan dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan publikasi laporan secara periodik (Mardiasmo 2006). Akuntabilitas tidak hanya sekedar dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan dan standar hukum yang berlaku, tetapi pemimpin entitas

berkewajiban untuk menyusun strategi akuntabilitas yang dapat berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi serta membangun kepercayaan masyarakat.¹¹ Akuntabilitas sebagai prinsip GCG ini mempunyai kewajiban kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyajikan dan melaporkan kegiatan perusahaan terutama bidang administrasi keuangan. Akuntabilitas sebagai sarana jaminan perlindungan memberikan hak suara kepada pemegang saham untuk dapat disampaikan dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Oleh karena itu, pentingnya kehadiran anggota Direksi dan anggota Komisaris Independen demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggung jawab. Adanya prinsip akuntabilitas memberikan dampak pada ketegasan dan kejelasan dalam pengelolaan perusahaan terkait dengan konsep pemisahan antara manajemen dengan pemegang saham. Prinsip akuntabilitas tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya.*” (QS. An-Nisa: 58)

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sosial para *shareholders* dan *stakeholders*. Secara singkat, perusahaan dituntut untuk menjunjung tinggi supremasi hukum (*Rule of Law*), antara lain patuh terhadap peraturan perpajakan, peraturan perlindungan konsumen, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, dan larangan tindakan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Prinsip korporasi dikatakan sehat apabila terjadi keseimbangan hubungan antara organ perseroan, *shareholder* dan *stakeholders*; pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perseroan sesuai struktur perseroan; mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan UUPT dan ADPT; pengurus perseroan yang melaksanakan

¹¹ Uun Dwi Al Muddatstsir, Dessy Noor Farida, and Early Ridho Kismawadi, “Praktik Akuntabilitas Masjid : Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 207–31.

penerapan GCG berdasarkan prinsip-prinsip *Transparency, Fairness, Accountability* dan *Responsibility* yang merupakan suatu proses berkesinambungan. Artinya, korporasi perlu untuk mengembangkan nilai saham dalam jangka panjang demi kepentingan perseroan sesuai dengan capaian maksud dan tujuan korporasi, yaitu memberikan laba bagi pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*. Prinsip tanggung jawab tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Muddassir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

(QS. Al-Muddassir: 38)

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi yaitu suatu komitmen bagi perusahaan untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta kewajaran dan kesetaraan. Upaya untuk menghindari adanya tindakan intervensi dari pihak lain dan juga sifat mendominasi dalam menjalankan tugas, maka prinsip independensi ini wajib dimiliki oleh setiap organ dalam perusahaan. Prinsip independensi tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 256)

5. Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Prinsip keadilan adalah tindakan yang sama rata dan tidak membedakan di antara para pemangku kepentingan. Adanya *good corporate governance* akan memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Prinsip keadilan memiliki dua

makna yang berbeda yaitu pertama, keadilan berkaitan dengan pengelolaan perusahaan yang sudah sepatutnya menjaga hak-hak pemegang saham, pengelolaan perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil bagi pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing. Kedua, setiap pemegang saham berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ganti rugi apabila hak-haknya tidak terpenuhi. Ganti rugi ini merupakan wujud dari perlindungan hukum bagi kepemilikan saham, dasarnya hampir sama di seluruh dunia yaitu berasaskan keadilan.¹² Prinsip keadilan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan*” (QS. An-Nahl: 90)

Bagi perbankan syariah, sudut pandang mengenai *Good Corporate Governance* adalah suatu asset yang mana perlu untuk dijaga keberadaan dan keberlangsungan dalam menjalankan prinsip-prinsipnya, sehingga GCG dapat terus berkembang dengan baik dan dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai strategi investasi. Budaya *governance* hendaknya selalu diikutsertakan dalam setiap pengambilan kebijakan penting yang dilakukan oleh manajemen. Strategi penerapan GCG penting untuk diperhatikan, mengingat bank syariah ini merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana yang dipercaya oleh masyarakat dan juga para pemegang saham untuk menanamkan modalnya.

Implementasi GCG yang baik dan sesuai dengan ketentuan akan memberikan dampak yang positif bagi bank syariah yaitu bank syariah akan mempunyai kendali untuk menciptakan nilai perusahaan, prasarana, kualitas dalam pengambilan keputusan, dan mempunyai strategi deteksi lebih awal terhadap produk, pelayanan, dan area bisnis yang beresiko tinggi. Pada hakikatnya, GCG merupakan sarana untuk mencapai visi dan misi perbankan syariah. Visi utama dari bank syariah yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), sedangkan misinya yaitu mempersiapkan konsep dan melakukan

¹² Aang Anzal Muhammad Gofar and Gemala Dewi, “Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi,” *Al-Ma’al* 2, no. 1 (2021): 229–40.

pengawasan terhadap risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan operasi bank syariah yang sesuai dengan ciri khasnya.¹³

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) unsur mekanisme *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 1 Ayat 3, menyebutkan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan publik yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai dengan ketentuan dan bertugas memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 28, menyebutkan bahwa tanggung jawab dewan komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan perseroan oleh direksi. Selain itu, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 30 menyebutkan bahwa dewan komisaris memiliki hak untuk memberhentikan sementara anggota direksi. Adanya beberapa POJK ini memberikan indikasi bahwa keberadaan dewan komisaris mempunyai yang cukup strategis dalam mekanisme *Good Corporate Governance*.

Dewan komisaris adalah salah satu organ penting perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melaksanakan fungsi monitoring terhadap kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh direksi. Untuk memperkuat citra dan nilai perusahaan dalam pandangan masyarakat dan pemegang saham, dewan komisaris berkewajiban memberikan arahan/nasihat kepada direksi terhadap pengelolaan perbankan dengan etika yang baik, prinsip kehati-hatian serta penuh tanggung jawab.

Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, membutuhkan pedoman kerja sebagai acuan untuk menjalankan peran dan fungsi dalam memonitoring kegiatan operasi bank umum syariah serta berkewajiban untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman kerja ini disusun sebagai acuan untuk mempermudah kerja dewan komisaris agar dapat melaksanakan tugas secara, efektif, efisien, independen, kompeten, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kinerja dewan komisaris dapat memberikan

¹³ Nur Hidayati Setyani, "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Economica II* (2012): 43–56.

kepercayaan oleh semua pihak yang berkepentingan. Pedoman kerja dewan komisaris ini disusun sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.¹⁴

Keberadaan dewan komisaris dengan peran dan fungsi *monitoring* yang dimilikinya diharapkan dapat berpengaruh untuk menekan tindakan oportunitis manajemen sehingga dapat menyajikan laba yang berkualitas dalam laporan keuangan. Dewan komisaris dapat melakukan fungsi *monitoring* melalui rapat dewan yang dijadikan media komunikasi dan koordinasi para anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi manajemen. Rapat tersebut sebagai wadah para dewan komisaris untuk berdiskusi menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, menyusun strategi dan arah perusahaan, perbaikan setiap kebijakan yang telah diambil oleh manajemen, dan mencari solusi atas masalah benturan kepentingan antara agen dan principal.

Dewan komisaris berkomitmen menjalankan tugasnya untuk mengawasi tindakan apapun maupun keputusan yang diambil oleh manajer agar tidak berbuat dari hal yang dapat merugikan pemegang saham. Dewan komisaris harus dengan jumlah yang tepat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa bank wajib mempunyai anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.¹⁵

b. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 Pasal 1 Ayat 1, Komite Audit yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit mempunyai tugas untuk memastikan laporan keuangan disajikan sesuai dengan kinerja keuangan perusahaan agar laporan keuangan dapat memenuhi unsur *reliable*.¹⁶ Komite audit harus beranggotakan minimal 3 (tiga) orang serta salah satu anggota berasal dari Komisaris Independen atau pihak luar yang merangkap sebagai ketua

¹⁴ Piter Nainggolan, "KEANEKA RAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT 'PERSPEKTIF TATA KELOLA' DIHADAPKAN DENGAN KINERJA KEUANGAN," *Lentera Akuntansi* 5, no. 1 (2020): 66–87.

¹⁵ Dewi Ratnaningsih and Stevanie Mashelia, "Pengaruh Faktor Pengawasan Internal (Ukuran Dewan Komisaris Dan Komite Audit) Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)," *Bisnis Dan Akuntansi* XIV, no. 2 (2020): 1–10.

¹⁶ Nainggolan, "KEANEKA RAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT 'PERSPEKTIF TATA KELOLA' DIHADAPKAN DENGAN KINERJA KEUANGAN."

komite audit, lalu memiliki minimal 1 (satu) anggota yang memiliki spesialisasi di bidang akuntansi maupun keuangan. Wajib mengadakan rapat rutin minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.¹⁷

Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan oleh manajemen dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Beberapa tugas komite audit yaitu memeriksa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, memberikan penilaian atas pengendalian internal, memeriksa sistem pelaporan eksternal dan ketaatan terhadap peraturan. Di dalam melaksanakan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan komisaris, manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara komite audit, auditor internal dan auditor eksternal akan memberikan kemudahan dalam proses audit internal maupun eksternal. Proses dan hasil audit internal dan eksternal yang berkualitas akan mempengaruhi presisi dari laporan keuangan dan berdampak juga terhadap kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Di bidang laporan keuangan, komite audit mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan validitas hasil usaha, kondisi keuangan serta rencana dan komitmen jangka panjang. Selain itu, dari segi tata kelola perusahaan, komite audit bertanggung jawab untuk mendorong manajemen menerapkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Di bidang pengawasan, komite audit bertanggungjawab untuk memberikan kepastian (*assurance*) serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah, mengevaluasi kegiatan usaha, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Komite audit memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Fungsi pengawasan merupakan bagian yang cukup fundamental dalam struktur perusahaan. Masalah keagenan yang terjadi antara dengan agen (*management*) dan prinsipal (*shareholder*) memicu tindakan prinsipal membentuk dewan komisaris (*board of directors*) untuk melakukan proses *monitoring* terhadap kinerja agen. Dewan komisaris menunjuk anggota komite audit yang independen dalam membantu menjalankan tugas dan fungsinya mewakili investor untuk melakukan proses *monitoring* terhadap kebijakan agen (*corporate control*).

¹⁷ Nazila Alfiyasahra and Auliffi Ermian Challen, "Pengaruh Kualitas Komite Audit Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017)," *Akuntansi Indonesia* 9, no. 1 (2020): 37–51.

Pengawasan oleh komite audit tidak hanya berhubungan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di perusahaan. Di dalam dunia bisnis, ERM didefinisikan sebagai cara atau proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risiko dan menangkap peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Komite audit yang menerapkan ERM menjalankan fungsi penasihat (*advisory*) melalui dewan komisaris.

Sehubungan dengan laporan keuangan, komite audit menjalankan fungsi pengawasan terhadap metode akuntansi perusahaan yang berpotensi timbulnya praktik manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan oportunitis manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi. Tindakan manajemen laba dinilai sebagai perbuatan yang legal dilakukan dengan manipulasi. Apabila manipulasi yang diterapkan dalam kebijakan akuntansi menyeleweng dari peraturan, maka tindakan manajemen tersebut bisa mengarah kepada kecurangan (*fraud*). Oleh sebab itu, komite audit menjalankan fungsi pengawasan dengan menganalisis penggunaan kebijakan akuntansi yang bebas dari berbagai model asumsi.¹⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menerangkan beberapa tanggung jawab komite audit, yaitu:¹⁹

- 1) Melakukan pengawasan terhadap informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh perusahaan kepada khalayak umum atau pihak otoritas antara lain berupa laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya.
- 2) Melakukan pengawasan mengenai patuh atau tidaknya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Mengutarakan opini dengan memegang sikap independen ketika timbul perbedaan pendapat diantara akuntan publik dan manajemen.
- 4) Memberikan saran terkait dengan penetapan akuntan publik kepada dewan komisaris.
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan auditor internal dan selanjutnya mengawasi tindakan lanjutan oleh direksi atas temuan auditor internal.

¹⁸ Florentina Widita Sari, "Pengaruh Komite Audit Terhadap Persistensi Laba," *Accounting and Economic* 1, no. 1 (2020): 76–92.

¹⁹ Nicholas Yawada Zocho Wau, Anita Nopiyanti, and Lidya Primta Surbakti, "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEAHLIAN KOMITE AUDIT, DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT," *Prosiding Biema* 1 (2020): 807–19.

- 6) Meneliti pengaduan dari berbagai pihak berkaitan dengan proses akuntansi dan laporan keuangan perusahaan.
- 7) Memberikan rekomendasi atas terjadinya konflik benturan kepentingan kepada dewan komisaris.
- 8) Memberikan perlindungan terhadap data informasi dan dokumen penting perusahaan.

c. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.²⁰ Di sisi lain ada 3 (tiga) alasan DPS memiliki peranan yang penting dalam bank syariah, antara lain:

- 1) Menetapkan tingkat kredibilitas bank syariah.
- 2) Sebagai unsur utama dalam menciptakan jaminan keputusan syariah (*sharia compliance assurance*).
- 3) Sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab yang cukup krusial dalam perbankan syariah yaitu melakukan proses pengawasan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. DPS berkewajiban untuk menjamin bahwa seluruh produk dan standar operasional kerja bank syariah telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena keberadaan DPS memiliki peranan yang sangat penting dalam bank syariah, maka terbitlah dua undang-undang Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa perusahaan berdasarkan syariah dan institusi perbankan syariah menganggap penting kedudukan DPS untuk memperkuat kesinambungan operasional bank syariah.

²⁰ A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, "Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah)," *Islamic Economics* 2, no. 2 (2020): 82–93, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyebutkan bahwa optimalisasi peranan DPS sangat diperlukan untuk menjamin setiap produk dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV Ayat (2) menerangkan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS. DSN adalah satu-satunya badan yang memiliki kekuasaan mengeluarkan fatwa syariah terhadap kegiatan, jenis produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Selain itu, peran DSN dan DPS tidak hanya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syariah saja, namun mempunyai peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Jasa pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah hendaknya tidak boleh menyeleweng dari prinsip syariah. Dikarenakan orientasi pelayanan bukan bertujuan sekedar hanya untuk memperoleh laba seperti bank konvensional, maka bank syariah menentukan beberapa kontrak syariah yang telah disepakati bersama. Dewan Pengawas Syariah mempunyai peranan yang strategis dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah, yaitu:

- 1) Menetapkan pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah menurut ketentuan yang telah disepakati oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 2) Membuat laporan secara periodik mengenai bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang bersangkutan sudah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban untuk membuat suatu laporan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali yang berkaitan dengan pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah terkhusus di bank-bank syariah yang berada dalam pengawasannya.
- 4) Apabila DPS mendapati suatu produk baru hasil inovasi suatu bank syariah yang berada dibawah pengawasannya, maka DPS memiliki kewajiban untuk meneliti dan memberikan tanggapan tas produk baru tersebut.
- 5) Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan instisusi keuangan syariah.²¹

²¹ Bagya Agung and Jasri Bin, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," 2016, 113–29.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat (*fiqh al-muamalat*). Anggota DPS bisa diluar dari anggota fikih, tetapi harus ahli di bidang lembaga keuangan Islam dalam fikih muamalat. Keanggotaan DPS minimal terdiri dari tiga anggota. DPS dapat mencari jasa konsultan yang mempunyai keahlian dalam ekonomi, bisnis, akuntansi, hukum dan lain-lain. Anggota DPS tidak boleh berasal dari dewan direksi atau anggota pemegang saham lembaga keuangan Islam. DPS adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk memberikan pengarahan, *mereview* dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, serta fatwa anggota DPS akan mengikat lembaga keuangan Islam.²²

4. Bank Umum Syariah

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ada dua macam sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, menyatakan bahwa bank syariah merupakan entitas yang melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Undang-Undang bank syariah juga memberikan amanah kepada bank syariah untuk melaksanakan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dibagi menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

²² Ari Kristin P, "ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PERSEPSI SUPERVISOR DAN MANAJER MENGENAI INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARI' AH (Studi Kasus Pada Bank Syari' Ah Di Indonesia)," *Economica* II, no. 15 (2012): 129–52.

Bank Umum Syariah (BUS) yaitu entitas yang menjalankan operasional usahanya sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mana kegiatan utamanya menyediakan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³ Bank umum syariah dikenal juga dengan istilah *full branch*, disebabkan bank syariah ini tidak berada dibawah koordinasi bank konvensional sehingga aktivitas yang dijalankan terpisah dari bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi kegiatan usaha dan pelaporan hasil usahanya terpisah dari bank induk.

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan demokrasi ekonomi. Bank syariah mempunyai tujuan sosial yaitu berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan, mempromosikan nilai dan etika berbisnis dalam pandangan Islami, dan ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.²⁴ Selain tujuan sosial, bank syariah juga memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- 1) Bank Syariah dan UUS bertanggungjawab melaksanakan fungsi untuk menghimpun dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS diberikan amanah untuk melaksanakan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, kemudian disalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang bersumber dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan fungsi sosial sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

c. Produk Bank Syariah

Bank syariah mempunyai 3 produk Secara sederhana, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:²⁶

²³ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

²⁴ Ratno Agriyanto, "REDEFINING OBJECTIVE OF ISLAMIC BANKING ; STAKEHOLDERS PERSPECTIVE IN INDONESIA," *Economica* VI, no. June 2014 (2015): 77–90.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah," www.ojk.go.id, accessed February 14, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

²⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

1) Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli

Jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan proses transfer kepemilikan suatu barang. Bank menyebutkan spesifikasi harga dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang pada saat awal terjadinya akad. Ada tiga jenis transaksi jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna*.

b) Prinsip Sewa

Sewa dalam istilah lain disebut dengan *ijarah* yaitu kontrak perjanjian antara kedua belah pihak dengan tujuan pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang bersifat sementara waktu tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang yang disewa. Secara sederhana, bank menyediakan fasilitas yang dapat dipergunakan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan tarif biaya sewa yang telah ditentukan.

c) Prinsip Bagi Hasil

(1) *Musyarakah* merupakan jenis produk bank syariah yang melakukan kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka mengembangkan aset yang dimiliki bersama dengan menggabungkan sumber daya baik yang berwujud maupun tak berwujud. Contoh praktik musyarakah dalam perbankan yaitu diterapkan dalam hal pembiayaan proyek. Setelah proyek yang dijalankan selesai, maka nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana beserta dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama dalam kontrak perjanjian.

(2) *Mudharabah* merupakan jenis lain dari produk bank syariah yang melakukan kontrak kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Pemilik modal memberikan kepercayaan kepada *mudharib* untuk mengelola modalnya dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

2) Penghimpunan Dana

Beberapa produk bank syariah yang meliputi penghimpunan dana diantaranya tabungan, giro dan deposito. Tabungan merupakan simpanan yang apabila dilakukan penarikan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro merupakan simpanan yang setiap waktu dapat dilakukan penarikan dengan cara pemindah bukuan atau menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya. Deposito merupakan wadah yang dapat dipergunakan oleh nasabah sebagai salah satu tempat untuk berinvestasi dalam bentuk surat berharga. Bank syariah menerapkan dua prinsip sebagai berikut:

a) Prinsip *Wadiah*

Wadiah yaitu berupa simpanan atau titipan pada bank syariah. Prinsip wadiah yang pertama yaitu *wadiah yad dhamanah*, dilakukan apabila bank sebagai pihak yang dititipi memiliki tanggung jawab atas keutuhan harta yang dititipkan sehingga bank diperkenankan untuk memberdayakan atau mengelola harta tersebut. Sedangkan prinsip wadiah yang kedua yaitu *wadiah amanah* yang mana harta yang diamanahkan sebagai titipan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam bentuk apapun.

b) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip mudharabah menekankan bahwa pihak penyimpan atau deposan bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian yaitu *mudharabah mutlaqoh*, *mudharabah muqayaddah on balance sheet*, dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Manajemen Laba digunakan sebagai bahan acuan dan kajian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

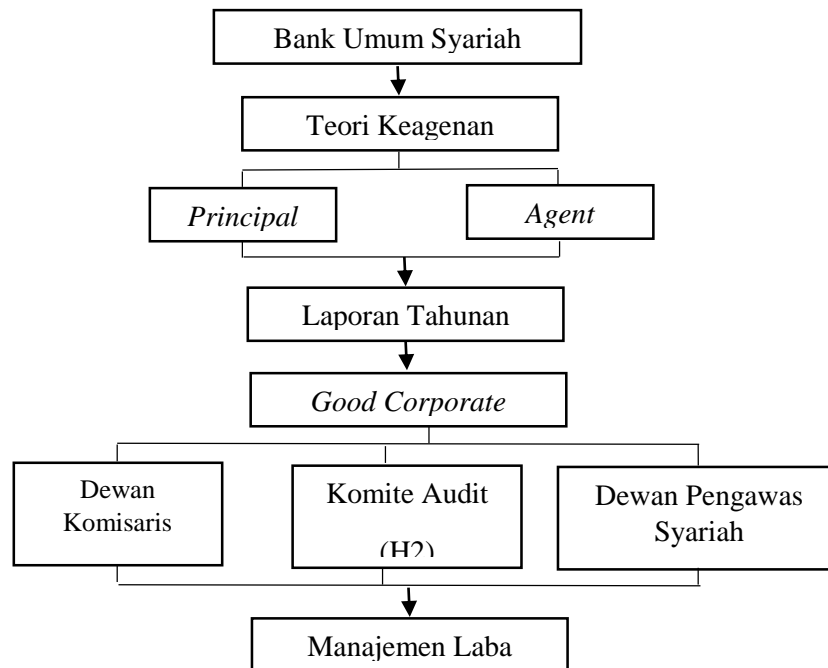
No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andriawan & Novia, 2019)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Perusahaan dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba	Sampel sebanyak 313 dan menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Sedangkan Kinerja Perusahaan berpengaruh dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.
2	(N. G. Putri & NR, 2019)	Pengaruh Keahlian Akuntansi Komite Audit dan Dewan Komisaris Wanita terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Sampel sebanyak 63 perusahaan dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keahlian Akuntansi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, sedangkan Dewan Komisaris Wanita berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba.
3	(Ulina, Mulyadi, & Sri Tjahjono, 2018)	Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	Sampel sebanyak 39 perusahaan dengan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba, sedangkan Spesialisasi Industri Auditor, Audit Tenure, Ukuran Komite Audit, Kompetensi Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

4	(Wirayana & Sudana, 2018)	Pengaruh Kosentrasi Kepemilikan dan Kompetensi Dewan Komisaris pada Manajemen Laba di Perusahaan Perbankan	Sampel sebanyak 180 perusahaan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsentrasi Kepemilikan yang dibagi menjadi dua yaitu Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Sedangkan Kompetensi Dewan Komisaris yang dibagi menjadi tiga yaitu Kompetensi dalam Bidang Spesifik Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba, Bidang Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.
5	(Kodriyah et al., 2017)	Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Medeteksi Praktik Manajemen Laba	Menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak mampu meminimalisir praktik Manajemen Laba, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, dan Dewan Komisaris mampu memprediksi praktik Manajemen Laba.
6	(Nurjanah, 2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)	Sampel sebanyak 33 perbankan, menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Komite Audit tidak

			berpengaruh terhadap Manajemen Laba, sedangkan Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
7	(Taco & Ilat, 2016)	Pengaruh <i>Earning Power</i> , Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Sampel sebanyak 30 perusahaan, menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. <i>Earning Power</i> , Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Secara bersama-sama <i>Earning Power</i> , Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
8	(Anhara, 2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Syariah di Indonesia)	Metode yang digunakan yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan sebagai Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

C. Kerangka Penelitian

Kerangka berfikir adalah konsep mengenai keterkaitan antara variabel satu dengan berbagai faktor lainnya. Disusun dari beberapa teori, kemudian dianalisis secara kritis, dan dirumuskan hipotesis. Maka skema hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atas perumusan masalah penelitian, yang pada umumnya rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikarenakan jawaban atas pertanyaan masih berdasarkan pada teori yang revelan belum diperoleh data dan ditemukannya fakta-fakta empiris, maka jawaban tersebut masih bersifat sementara. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan dugaan semnetara yang bersifat teoritis atas rumusan masalah penelitian.

1. Hubungan Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol dan organ perusahaan yang penting dalam *corporate governance*.²⁷ Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan manajemen puncak, ketika tindakan manajemen diawasi maka manajemen akan lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan dan membatasi perilaku manajemen laba. Keberadaan dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk memonitor laporan keuangan perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dapat memperoleh laporan laba yang berkualitas. Perusahaan yang mempunyai jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (*outside director*) dapat berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, maka teori agensi menjelaskan bahwa dalam mengurangi perilaku manajemen laba pada perusahaan yaitu investor membuat biaya agen dalam memonitor perilaku manajemen dalam perusahaan.

Permasalahan agensi yang terjadi antara dewan direksi dengan pemegang saham diharapkan dapat dikurangi karena keberadaan dewan komisaris dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Di samping itu, dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam mengawasi jalannya perusahaan, menyusun strategi serta menjamin bahwa manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dewan komisaris mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi secara aktif serta melakukan penetapan agenda dan strategi, maka dewan komisaris memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan dengan tujuan untuk mengawasi perilaku manajemen laba yang berpengaruh pada kurangnya kepercayaan investor. Selain itu, dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan kualitas laba dengan cara membatasi perilaku manajer dan memberikan nasihat kepada manajer. Jadi semakin banyak dewan komisaris di dalam suatu perusahaan, maka semakin ketat pengawasan sehingga dapat meminimalisir tindakan manajemen laba.

Peran dan fungsi dari dewan komisaris dalam melaksanakan sistem pengawasan mampu untuk mencegah dan meminimalisir tindakan oportunitis manajemen. Semakin

²⁷ Suci Asyati and Farida, "Pengaruh Good Corporate Governance , Leverage , Profitabilitas Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018)," *JEMATech* 3, no. 1 (2020): 36–48.

besar ukuran dewan komisaris akan memberikan kemudahan dalam proses pengawasan. Hasil penelitian oleh Mersni & Ben Othman (2016); Obigbemi et al. (2016); dan Kolsi & Grassa (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Hubungan Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit memiliki tanggung jawab utama membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya termasuk masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit, serta sistem pelaporan keuangan.²⁸ Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/MMBU/2002 komite audit mempunyai tugas untuk mengawasi laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Keberadaan komite audit berdampak pada laporan keuangan, seperti menurunnya ketidaktepatan pengungkapan akuntansi, menurunnya ketidaktepatan pengukuran akuntansi, dan menurunnya praktik kecurangan manajemen. Sehingga dalam hal ini komite audit berkontribusi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada teori agensi sesuai dengan Keputusan No. 29/PM/2004 mengenai komite audit menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang mempunyai tugas dalam pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit berperan penting bagi pengelolaan perusahaan dan dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam mengatasi masalah pengendalian. Komite audit mempunyai manfaat untuk menjamin transparansi laporan keuangan, keadilan *stakeholders*, dan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen sehingga dengan adanya pengawasan yang ketat manajemen akan sulit mendapatkan peluang untuk melakukan praktik kecurangan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Komite audit adalah pihak yang berhubungan dengan dewan komisaris di mana komite audit membantu dewan komisaris untuk meningkatkan laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Keberadaan komite audit bertujuan

²⁸ Anisa and Elly Suryani, "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)," *Management* 7, no. 1 (2020): 755–63.

untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar tercipta praktik perusahaan yang transparan yang berguna untuk meminimalisir perilaku manajemen laba pada perusahaan, sehingga komite audit yang efektif bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang di audit serta membantu dewan direksi untuk memajukan perusahaan dalam hal kepentingan pemegang saham. Perusahaan berharap agar keberadaan komite audit mampu memaksimalkan mekanisme *checks and balances* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini didukung oleh penelitian Marsha & Ghozali (2017), Badria & Maslichah (2017), Putra (2019), dan Natsir & Badera (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat menurunkan praktik manajemen laba. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Hubungan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang memiliki otoritas untuk melakukan supervisi ataupun pengawasan serta mengamati secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah sehingga tidak ada aktivitas lembaga tersebut yang tidak mengikuti aturan atau tidak berprinsip syariah. DPS merupakan lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (*fiqh almuamalat*), tetapi DPS bisa juga anggota diluar fiqh muamalat. DPS mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, *mereview*, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar berjalan mematuhi aturan dan prinsip syariah.²⁹

Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi ganda dalam perusahaan, fungsi yang pertama sebagai pihak internal yaitu melakukan pengawasan syariah terhadap aktivitas perusahaan. Fungsi yang kedua sebagai pihak eksternal yaitu badan atau sarana yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Alasan utama dibentuknya DPS pada lembaga perbankan syariah adalah untuk memastikan seluruh aktivitas-aktivitas serta prinsip-prinsip yang dilakukan perbankan syariah tidak melenceng dari aturan yang ada. DPS juga menjadi kontrol yang kuat bagi perusahaan. Tugas DPS yang tidak kalah penting

²⁹ Ekawati and Muhammad Anhar, "PENGARUH PROFITABILITAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN INVESTMENT ACCOUNT HOLDER TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019)," 2020, 1–18.

yaitu memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar seluruh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.³⁰

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas untuk meminimalisir informasi asimetris berkaitan dengan kepatuhan syariah antara manajer dan seluruh pihak yang berkepentingan. DPS merupakan satu diantara jenis instrument *good corporate governance* pada perbankan syariah yang bersinergi untuk menjaga dan mengawasi aktivitas perbankan dari hal yang bertentangan dengan prinsip dan nilai syariah. Manajemen laba merupakan tindakan yang menyeleweng terhadap prinsip-prinsip syariah karena mengakibatkan terjadinya bias informasi yang secara sengaja dilakukan oleh manajemen demi memenuhi hasrat pribadi. Jika jumlah DPS dalam lembaga keuangan semakin banyak, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik, serta membuat pengelolaan bank syariah akan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga berdampak pada tidak adanya penggunaan dana yang tidak menggunakan prinsip syariah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Quttainah, Song & Wu (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah merupakan mekanisme efektif untuk mencegah perilaku oportunistik oleh manajemen. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian lain oleh Kolsi & Grassa (2017) yaitu semakin banyak dewan pengawas syariah akan meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga dapat menurunkan tindakan manajemen laba di bank syariah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

³⁰ Azizah and NR, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018)."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka atau non angka yang diangkakan, kemudian diolah dengan menggunakan rumus statistik tertentu dan dianalisis guna untuk menguji rumusan hipotesis yang tersedia, serta bertujuan mengetahui sebab akibat (kausalitas) sesuatu. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga hanya menggunakan data rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Data yang akan diolah dalam penelitian bersumber dari data rasio keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan adalah periode 2016-2019 dan waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2021.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum dan memiliki karakteristik yang cenderung sama (Netra 1976). Populasi dalam penelitian ini menggunakan objek perbankan syariah yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah yang tercatat di statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK periode 2016-2019. Jumlah Bank Umum Syariah yang tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS).

Setelah menetapkan populasi, langkah berikutnya yaitu pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara peneliti mengambil sampel dari populasi yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam statistik perbankan syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2019.
2. Bank Umum Syariah yang mengungkapkan *annual report* secara lengkap tahun 2016-2019.
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan informasi mengenai data terperinci tentang manajemen laba dan mekanisme *corporate governance*.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data menggunakan skala pengukuran rasio dengan desain uji hipotesis data sekunder berupa data panel. Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau penelitian arsip yang berisi informasi tentang peristiwa masa lalu. Data sekunder tersebut bersumber dari buku, jurnal, majalah, data statistik ataupun dari internet.

Sumber data yang digunakan diperoleh dari *Annual Report* masing-masing bank syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan periode tahun 2016-2019 yang dapat dilihat pada website resminya yaitu www.ojk.go.id dan situs web bank syariah yang bersangkutan.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39).³¹ Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manajemen laba yang di proksikan dengan *discretionary accrual* menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow *et al.*, (1995). Perhitungan yang dilakukan dengan cara menghitung total laba akrual, lalu memisahkan tingkat laba akrual yang wajar (*nondiscretionary accrual*) dan *discretionary accrual* tingkat laba akrual yang tidak normal (*discretionary accrual*).

a. Mengukur total *accruals* yang dihitung dengan rumus:

$$TAC_{it} = Nit - CFO_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total *accruals* perusahaan i pada periode ke t

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

b. Menghitung nilai *accruals* diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{REV_{it} - REV_{it-1}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

³¹ Niantoro Sutrisno, Evan Jaelani, and Rina Wijaya, "PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada PT. Kiyokuni High Precision Automotive Indonesia)," *JAB* 6, no. 02 (2020): 88–97.

Keterangan

- TACit = Total *accruals* perusahaan i pada periode ke t
 Ait-1 = Total asset perusahaan i pada tahun t-1
 REVit = Pendapatan perusahaan i pada tahun t
 REVit-1 = Pendapatan perusahaan i pada tahun t-1
 PPEit = Jumlah aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

- c. Menghitung *Non-Discretionary Accruals* dengan rumus sebagai berikut:

$$NDAit = \beta_1 \left(\frac{1}{Ait-1} \right) + \beta_2 \left(\frac{[REVit-REVit-1]-[RECit-RECit-1]}{Ait-1} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPEit}{Ait-1} \right)$$

Keterangan

- NDAit = *Non-Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t
 Ait-1 = Total asset perusahaan i pada tahun t-1
 REVit = Pendapatan perusahaan i pada tahun t
 REVit-1 = Pendapatan perusahaan i pada tahun t-1
 PPEit = Jumlah aktiva tetap perusahaan i pada tahun t
 RECit = Piutang perusahaan i pada tahun t
 RECit-1 = Piutang perusahaan i pada tahun t-1

- d. Menghitung nilai *Discretionary Accruals* dengan rumus

$$DAit = \left(\frac{TACit}{Ait-1} \right) - NDAit$$

Keterangan

- DAit = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t
 TACit = Total *accruals* perusahaan i pada periode ke t
 Ait-1 = Total asset perusahaan i pada tahun t-1
 NDAit = *Non-Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t

2. Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2017:39)³² variabel independen atau bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau munculnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah.

³² Sutrisno, Jaelani, and Wijaya.

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris atau *Board of Commissioner* (BOC) adalah salah satu organ perusahaan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan proses *monitoring* dan memberikan nasihat kepada direktur. Selain itu, dewan komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan perusahaan yang bersangkutan telah menerapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG). Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.³³

$$DK = \Sigma \text{Jumlah dewan komisaris dalam setahun.}$$

b. Komite Audit

Komite Audit atau *Audit Committee* (AC) adalah suatu komite yang menjalankan tugas untuk melakukan audit internal suatu perusahaan. Sebagai salah satu organ dari *Good Corporate Governance* (GCG), komite audit bertanggungjawab menyediakan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan yang telah diaudit secara wajar patuh terhadap ketentuan hukum, memberikan arahan dan mengelola usahanya secara etis, serta mampu mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap kesalahan (*fraud*). Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan.³⁴

$$KA = \Sigma \text{Jumlah komite audit dalam setahun.}$$

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang bertugas melaksanakan evaluasi (*evaluating*), pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah untuk menjamin bahwa aktivitas operasional bank syariah telah mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana ketetapan fatwa dan syariah Islam. Dalam penelitian ini DPS diukur dengan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan.³⁵

$$DPS = \Sigma \text{Jumlah dewan pengawas syariah dalam setahun.}$$

³³ Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, and Santi Octaviani, "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENDETEKSI PRAKTIK MANAJEMEN LABA," *Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 59–64.

³⁴ Kodriyah, Suprihatin, and Octaviani.

³⁵ Kodriyah, Suprihatin, and Octaviani.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengelola data agar dapat ditafsirkan, yang berarti memberikan makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antar berbagai variabel. Pengolahan data menggunakan software *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Analisis data ini dilakukan dengan Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Logistik yang terdiri dari Uji Kelayakan Model, Uji Keseluruhan Model, Uji Koefisien Determinasi, Pengujian Secara Simultan, dan Pengujian Secara Parsial.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis dasar dalam perhitungan statistik. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata (*mean*), nilai yang sering muncul (*mode/modus*), jumlah (*sum*), deviasi standar atau simpangan baku (*standard deviation*), ragam data (*variance*), selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah (*range*), nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maximum*), dan lainnya. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data secara ringkas sehingga dapat diketahui apakah persebaran datanya normal atau tidak.

2. Analisis Regresi Logistik

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*) yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel independen (dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah) terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Regresi logistik menggunakan model binary logistic, yaitu model yang memiliki variabel dependen berupa kategori sedangkan variabel independennya berupa data numerik. Kategori variabel dependen dengan nilai 0 untuk perbankan syariah yang tidak melakukan manajemen laba dan nilai 1 untuk perbankan syariah yang melakukan manajemen laba.

Model Regresi Logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$ML = \beta_0 + \beta_1 DK + \beta_2 KA + \beta_3 DPS + \epsilon$$

Keterangan

β_0 = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien

ML = Manajemen Laba

DK = Dewan Komisaris

KA = Komite Audit

DPS = Dewan Pengawas Syariah

ε = variabel gangguan

a. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Uji kelayakan model dalam *logistic regression* dapat diketahui dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's of Fit Test*. Tujuan dari *Hosmer and Lemeshow's of Fit Test* adalah menguji hipotesis nol apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga dapat dikatakan *fit*). Dasar pengambilan keputusan apakah model layak atau tidak yaitu dengan melihat *goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-square*. Adapun kriteria pengukurannya sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test Statistics* sama dengan atau kurang dari 0,05 ($\leq 0,05$) artinya terdapat perbedaan model dengan nilai observasinya sehingga *goodness of fit model* dikatakan tidak baik karena tidak dapat memprediksi nilai observasinya.
- 2) Apabila nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test Statistics* lebih besar dari 0,05 ($\geq 0,05$) artinya tidak terdapat perbedaan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness of fit model* dikatakan baik karena dapat memprediksi nilai observasinya.

b. Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji keseluruhan model bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model dikatakan *fit* atau tidak terhadap data statistik. Data statistik yang digunakan berdasarkan pada *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung koefisien logistik. MLE berfungsi untuk memaksimalkan *Log Likelihood* (LL) yang mencerminkan seberapa besar kemungkinan nilai aktual variabel dependen dapat diprediksi dengan menggunakan nilai variabel independen. Sehingga penilainnya dilakukan dengan membandingkan angka *-2 Log likelihood* pada awal (*Block Number = 0*) dengan angka *-2 Log likelihood* pada akhir (*Block Number = 1*).

- 1) Apabila angka *-2 Log likelihood* pada awal (*Block Number = 0*) lebih besar dari angka *-2 Log likelihood* pada akhir (*Block Number = 1*) atau mengalami penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada menunjukkan model regresi yang baik.
- 2) Apabila angka *-2 Log likelihood* pada awal (*Block Number = 0*) lebih kecil dari angka *-2 Log likelihood* pada akhir (*Block Number = 1*) atau mengalami kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada menunjukkan model regresi yang tidak baik.

c. Uji Koefisien Determinasi

Cox and Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang mudah diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke R Square*.

Nagelkerke's R Square merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R²* dengan nilai maksimumnya. Nilai yang kecil berarti kemampuan dari variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai variabel independen yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel tersebut memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi variabel dependen.

d. Pengujian Secara Simultan

Uji hipotesis secara simultan dalam analisis regresi logistik menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficients*. Variabel independen dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian secara simultan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen. Adapun tingkat signifikansinya sebesar 5% atau 0,05 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H1 diterima, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba.
- 2) Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H1 ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

e. Pengujian Secara Parsial

Uji hipotesis secara parsial dalam analisis regresi logistik menggunakan uji *wald*. Uji *wald* bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen dalam sebuah penelitian. Adapun tingkat signifikansinya sebesar 5% atau 0,05 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan perolehan data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder diambil dari laporan keuangan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh website masing-masing Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependennya yaitu Manajemen Laba, sedangkan variabel independen terdiri dari Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua *annual report* Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut data Statistik Perbankan Syariah periode 2016-2019. Bank Umum Syariah merupakan salah satu jenis bank syariah yang mana kegiatan utamanya memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperbolehkan yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 7/35/PBI/2005). Sedangkan sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang mempublikasikan data *annual report* secara lengkap di masing-masing website bank syariah periode 2016-2019. Berikut daftar sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Website
1	PT. Bank Aceh Syariah	www.bankaceh.co.id
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	www.bankntbsyariah.co.id
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
4	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
5	PT. Bank BRI Syariah	www.bankbsi.co.id
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
7	PT. Bank BNI Syariah	www.bankbsi.co.id
8	PT. Bank Syariah Mandiri	www.bankbsi.co.id
9	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
11	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id

12	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	www.btpnsyariah.com
14	PT. Bank Net Syariah	www.banknetsyariah.co.id

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020

B. Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian dengan penyajian data secara numerik. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui deskripsi dari variabel Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	56	3,00	5,00	3,5536	,65836
KA	56	2,00	6,00	3,9286	1,04198
DPS	56	2,00	3,00	2,2143	,41404
ML	56	-,02	,02	,0001	,00790
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

Dilihat dari tabel 4.2 di atas, dapat diketahui data observasi penelitian ini sebanyak 56 data. Berikut ini keterangan dari data analisis statistik deskriptif yang telah diolah dengan menggunakan software SPSS 25:

- a. Variabel Dewan Komisaris (X1) memiliki nilai minimum 3,00 nilai maksimum 5,00 nilai rata-rata 3,5536 dengan standar deviasi sebesar 0,65836. Artinya

bank umum syariah memiliki dewan komisaris rata-rata berjumlah 4 orang dan sesuai dengan syarat yang harus dimiliki perusahaan.

- b. Variabel Komite Audit (X2) mempunyai nilai minimum 2,00 nilai maksimum 6,00 nilai rata-rata 3,9286 dengan standar deviasi sebesar 1,04198. Artinya bank umum syariah mempunyai komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan sebanyak 3,92%.
- c. Variabel Dewan Pengawas Syariah (X3) mempunyai nilai minimum 2,00 nilai maksimum 3,00 nilai rata-rata 2,2143 dengan standar deviasi sebesar 0,41404. Artinya bank umum syariah memiliki jumlah dewan pengawas syariah dengan rata-rata berjumlah 2 orang yang mana sesuai dengan syarat perusahaan dengan prinsip syariah yaitu paling sedikit memiliki 2 orang anggota dewan pengawas syariah.

2. Analisis Regresi Logistik

a. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Uji kelayakan model regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Penelitian ini dalam uji kelayakan model regresi menggunakan *Hosmer and Lemeshow Test*, yaitu menguji hipotesis nol bahwa data empiris mempunyai kesesuaian atau kecukupan data (*fit*) pada model regresi logistik. Berikut hasil dari uji kelayakan model yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Kelayakan Model

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	4,211	7	,755

Berdasarkan tabel *Hosmar and Lemeshow Test* di atas, diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 4,211 dengan nilai signifikansi 0,755. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai signifikansinya lebih besar dari alpha ($0,755 > 0,05$), sehingga diinterpretasikan bahwa pada model regresi logistik yang digunakan telah memenuhi syarat kecukupan data (*fit*) dan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji keseluruhan model regresi dinilai dengan statistik *-2 Log likelihood*. Dasar penilaiannya yaitu apabila *-2 Log likelihood* pada saat *Block Number 0 = Beginning Block* lebih kecil dari nilai *-2 Log likelihood Block Number 1 = Method : Enter*, maka penambahan variabel ke dalam model memperbaiki model *fit*. Berikut hasil dari uji keseluruhan model yang dapat dilihat pada tabel *iteration history*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji -2 Log Likelihood Value

Block Number = 0 (Beginning Block)

		Iteration History ^{a,b,c}	
		-2 Log likelihood	Coefficients
Iteration			Constant
Step 0	1	36,233	-1,643
	2	33,796	-2,179
	3	33,699	-2,314
	4	33,699	-2,322
	5	33,699	-2,322

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 33,699

c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Diketahui pada tabel 4.4 *Block Number 0 = Beginning Block*, model pertama hanya menggunakan konstanta tanpa adanya variabel independen (bebas) diperoleh nilai *-2 Log likelihood* sebesar 33,699. Sedangkan pada tabel 3 *Block Number 1* model memasukkan konstanta dan variabel independen dengan nilai *-2 Log likelihood* sebesar 22,586.

Dari tabel 4.4 dan 4.5, memperlihatkan bahwa nilai *-2 Log likelihood* pada *Block Number 0* sebesar 33,699 dan nilai *-2 Log likelihood* pada *Block Number 1* mengalami penurunan nilai menjadi 22,586. Penurunan nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan.

Tabel 4. 5 Hasil Uji -2 Log Likelihood Value**Block Number 1 = Method : Enter**

		Iteration History ^{a,b,c,d}				
		-2 Log likelihood	Constant	Coefficients		
Iteration				Dewan Komisaris	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
Step 1	1	32,648	-1,340	-,440	,379	-,102
	2	26,211	-,994	-1,197	,885	-,277
	3	23,494	,514	-2,292	1,454	-,543
	4	22,672	2,055	-3,255	1,898	-,795
	5	22,588	2,676	-3,659	2,088	-,907
	6	22,586	2,742	-3,707	2,112	-,921
	7	22,586	2,742	-3,708	2,112	-,921

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 33,699

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R²) pada regresi logistik menggunakan model *summary*. Model *summary* bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu manajemen laba (*earnings management*). Berikut hasil dari uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	22,586 ^a	,180	,398

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Menurut hasil uji koefisien determinasi dengan model *summary*, diketahui bahwa uji model *-2 Log likelihood* menghasilkan nilai sebesar 22,586 dengan koefisien determinasi yang dilihat dari *Nagelkerke R Square* adalah 0,398 (39,8%) dan nilai *Cox & Snell R Square* adalah 0,180 (18%). Artinya variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah mampu untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu keterjadian penyajian kembali (*restatement*) sebesar 39,8% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

d. Pengujian Secara Simultan

Tujuan dari pengujian secara simultan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari pengujian secara simultan yang dapat dilihat pada tabel *omnibus tests*.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	11,112	3	,011
	Block	11,112	3	,011
	Model	11,112	3	,011

Berdasarkan tabel 4.7 *omnibus tests*, didapatkan nilai *Chi-square* sebesar 11,112 dan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang berarti $< 0,05$ atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan yaitu *Corporate Governance* (dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah) secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba (*earnings management*).

e. Pengujian Secara Parsial

Tujuan dari pengujian secara parsial adalah untuk menguji bagaimana pengaruh dari variabel independen. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan regresi logistik yang mana hasil yang diperoleh dapat dilihat melalui *variables in the equation*.

Jika tingkat signifikansi < 0,05, maka dapat dinyatakan hipotesis diterima. Berikut hasil dari pengujian secara parsial yang dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis

		Variables in the Equation					95% C.I.for EXP(B)		
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 ^a	Dewan Komisaris	-3,708	1,812	4,187	1	,041	,025	,001	,855
	Komite Audit	2,112	,903	5,467	1	,019	8,268	1,407	48,573
	Dewan Pengawas Syariah	-,921	1,410	,427	1	,514	,398	,025	6,307
	Constant	2,742	5,097	,289	1	,591	15,523		

a. Variable(s) entered on step 1: Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 4.8 *variables in the equation* di atas merupakan hasil dari pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5%. Dari pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh model regresi logistik sebagai berikut:

$$ML = 2,742 - 3,708 DK + 2,112 KA - 0,921 DPS$$

- 1) Dewan Komisaris menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -3,708 dengan nilai probabilitas (*Sig.*) 0,041 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.
- 2) Komite Audit menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 2,112 dengan nilai probabilitas (*Sig.*) 0,019 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.
- 3) Dewan Pengawas Syariah menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,921 dengan nilai probabilitas (*Sig.*) 0,514 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil statistik uji hipotesis dewan komisaris didapatkan nilai koefisien sebesar -3,708 dengan signifikansi sebesar 0,041 ($p > 0,05$) sehingga hipotesis 1 diterima. Oleh karena itu, kesimpulan yang diberikan adalah variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

Hasil penelitian yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba yang berarti bahwa peran dan kinerja dari dewan komisaris dapat mengendalikan atau mengontrol tindakan manajemen laba di bank umum syariah. Pada dasarnya manajemen laba pada perusahaan terjadi karena adanya *opportunistic behavior* yang dilakukan oleh manajer puncak. Semakin besar ukuran (jumlah) dewan komisaris di bank umum syariah, maka semakin kuat pula aktivitas *monitoring* terhadap manajer puncak yang dalam konteks ini adalah dewan direksi. Peningkatan jumlah dewan komisaris akan mempengaruhi efektivitas dari proses pengawasan yang lebih baik dalam meminimalisir praktik manajemen laba dengan cara memberikan *warning* atau memberi masukan bahkan tekanan jika terjadi penyimpangan pengelolaan usaha, sehingga *moral hazard* seperti manajemen laba dapat terhindarkan.

Hasil penelitian tentang dewan komisaris ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Murtini dan Mansyur (2012) yang menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil statistik uji hipotesis komite audit didapatkan nilai koefisien sebesar 2,112 dengan signifikansi sebesar 0,019 ($p > 0,05$) sehingga hipotesis 2 diterima. Oleh karena itu, kesimpulan yang diberikan adalah variabel ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

Hasil penelitian yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba memberikan makna bahwa komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi dan menjadi pengendali manajemen agar tidak melakukan praktik manajemen laba. Semakin banyak jumlah komite audit, efektivitas dari proses pengawasan akan meningkat sehingga dapat mencegah atau mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajemen. Ukuran (jumlah) komite audit yang besar mampu untuk mengawasi dan meneliti setiap laporan keuangan dari bank dengan lebih baik karena beban yang ditanggung oleh setiap anggota menjadi ringan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat ketelitian dan fokus yang lebih tinggi dari anggota komite audit, apalagi mereka bekerja di perusahaan terbuka yang mempunyai banyak aktivitas yang dioperasikan.

Hasil penelitian tentang komite audit ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013), yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba di Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil statistik uji hipotesis dewan pengawas syariah didapatkan nilai koefisien sebesar -0,921 dengan signifikansi sebesar 0,514 ($p > 0,05$) sehingga hipotesis 3 ditolak. Oleh karena itu, kesimpulan yang dibekirkan adalah variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

Hasil penelitian yang menyatakan ukuran dewan pengawas syariah tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba yang berarti bahwa jumlah dewan pengawas syariah di dalam bank umum syariah tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba. Anggota dewan pengawas syariah dalam konteks bank umum syariah rata-rata berjumlah 2 orang, yang mana telah memenuhi syarat regulasi yang telah ditetapkan untuk perusahaan yang berprinsip syariah. Namun, jika dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah dalam bank umum syariah pada

penelitian ini masih banyak yang belum memiliki keahlian pada bidang akuntansi dan keuangan, tetapi masih fokus pada keahlian bidang agama sesuai fatwa terhadap pengembangan mengenai produk bank syariah. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap laporan keuangan masih kurang optimal. Dengan demikian, banyak maupun sedikitnya jumlah dewan pengawas syariah belum mampu untuk mengurangi tindakan manajemen laba.

Hasil penelitian tentang dewan pengawas syariah ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Anhara (2015) dan Kodriyah (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nurjanah (2017) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah. Setelah melewati berbagai proses tahapan mulai dari pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran (jumlah) dewan komisaris di bank umum syariah, maka semakin efektif tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam mencegah atau meminimalisir praktik manajemen laba. Selain itu, hasil statistik uji hipotesis dewan komisaris juga membuktikan dengan diperoleh nilai koefisien sebesar -3,708 dengan signifikansi sebesar 0,041 ($p > 0,05$).
2. Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran (jumlah) komite audit, akan memberikan kemudahan bagi anggota komite audit dalam menjalankan tugasnya melakukan proses *monitoring* terhadap laporan keuangan bank umum syariah. Selain itu, hasil statistik uji hipotesis komite audit juga membuktikan dengan diperoleh nilai koefisien sebesar 2,112 dengan signifikansi sebesar 0,019 ($p > 0,05$).
3. Dewan Pengawas Syariah tidak signifikan berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hal tersebut dikarenakan dewan pengawas syariah belum mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan sehingga pengawasan terhadap laporan keuangan belum dilakukan secara efektif. Selain itu, hasil statistik uji hipotesis dewan pengawas syariah juga membuktikan dengan diperoleh nilai koefisien sebesar -0,921 dengan signifikansi sebesar 0,514 ($p > 0,05$).

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa kesimpulan dari penelitian ini belum mendapatkan hasil yang sempurna, disebabkan masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba, sedangkan masih ada banyak indikator lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba di bank umum syariah.

2. Keterbatasan jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Periode penelitian hanya 4 tahun dan belum memakai tahun terbaru, sehingga kesimpulan yang dihasilkan belum mampu untuk digeneralisasikan pada periode lainnya.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat memberikan beberapa saran atau rekomendasi untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di bank umum syariah antara lain:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan (*annual report*) bank syariah dengan memperbarui informasi setiap tahunnya agar dapat menyediakan informasi yang jelas dan *update* bagi pihak yang membutuhkan.
2. Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memakai jenis perusahaan yang berbeda sebagai pembanding, seperti mengganti objek penelitian di Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu sampel dalam penelitian.
3. Penelitian berikutnya pertimbangkan untuk memakai variabel lain dari *good corporate governance* seperti pendidikan, *skills background*, atau pengukuran *self assessment* dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan model lain untuk menghitung *discretionary accruals* selain model modifikasi Jones.
5. Jumlah periode penelitian perlu ditambahkan dan akan lebih baik jika memakai tahun terbaru, sehingga nantinya dapat terlihat bagaimana transformasi terkait dengan manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno. "REDEFINING OBJECTIVE OF ISLAMIC BANKING ; STAKEHOLDERS PERSPECTIVE IN INDONESIA." *Economica* VI, no. June 2014 (2015): 77–90.
- Agung, Bagya, and Jasri Bin. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," 2016, 113–29.
- Agustin, Partica Ayu. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia." *EFFICIENT* 3, no. 2 (2020): 811–27.
- Alfiyasahra, Nazila, and Auliffi Ermian Challen. "Pengaruh Kualitas Komite Audit Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017)." *Akuntansi Indonesia* 9, no. 1 (2020): 37–51.
- Anisa, and Elly Suryani. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)." *Management* 7, no. 1 (2020): 755–63.
- Asyati, Suci, and Farida. "Pengaruh Good Corporate Governance , Leverage , Profitabilitas Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018)." *JEMATech* 3, no. 1 (2020): 36–48.
- Azizah, Jumaini, and Erinos NR. "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018)." *Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2554–69.
- Bisnis.com. "Skandal Bank BJB Syariah Aher Dalam Jeratan Kredit Fiktif." www.m.bisnis.com, 2019. <http://m.bisnis.com/financial/read/20190326/90/904455/skandal-bank-bjb-syariah-aher-dalam-jeratan-kredit-fiktif>.
- Dewi, Putri Indar. "PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH." *AL-TSARWAH* 3, no. 2 (2020): 1–15.
- Ekawati, and Muhammad Anhar. "PENGARUH PROFITABILITAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN INVESTMENT ACCOUNT HOLDER TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019)," 2020, 1–18.

- Ermawati, Liya, and Nia Anggraini. "Pengaruh Komisaris Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)." *Akuntansi Dan Keuangan Islam* 01, no. 01 (2020): 61–70.
- Gofar, Aang Anzal Muhammad, and Gemala Dewi. "Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi." *Al-Maal* 2, no. 1 (2021): 229–40.
- Hariani, Ulfah, Nur Diana, and M Cholid Mawardi. "PENGARUH KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEAHLIAN KEUANGAN PADA KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP MANAJEMEN LABA." *E-JRA* 09, no. 04 (2020): 46–62.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah." www.ojk.go.id. Accessed February 14, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.
- Khumaini, Sabik, and M Nurzansyah. "Pengaruh Quick Ratio Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Pt . Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2016-2019." *Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 38–48.
- Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, and Santi Octaviani. "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENDETEKSI PRAKTIK MANAJEMEN LABA." *Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 59–64.
- Kompas.com. "Orang Dalam Bermain, Bank Syariah Mandiri Dibobol Rp. 50 Miliar." www.amp.kompas.com, 2015. <http://amp.kompas.com/megapolitan/read/2015/02/02/18582981/Orang.Dalam.Bermain.Bank.Syariah.Mandiri.Dibobol.Rp.50.Miliar>.
- Lestari, Iin Fitri, and Ulfi Kartika Oktaviana. "PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada BPRS Di Jawa Timur)." *Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2020): 29–36.
- Muddatstsir, Uun Dwi Al, Dessy Noor Farida, and Early Ridho Kismawadi. "Praktik Akuntabilitas Masjid : Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 207–31.
- Nainggolan, Piter. "KEANEKA RAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT 'PERSPEKTIF TATA KELOLA' DIHADAPKAN DENGAN KINERJA KEUANGAN."

Lentera Akuntansi 5, no. 1 (2020): 66–87.

Novitasari, Triana, Nur Hisamuddin, and Bunga Maharani. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *JEAM* 18, no. 2 (2019): 85–94.

P, Ari Kristin. “ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PERSEPSI SUPERVISOR DAN MANAJER MENGENAI INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia).” *Economica* II, no. 15 (2012): 129–52.

Ratnaningsih, Dewi, and Stevanie Mashelia. “Pengaruh Faktor Pengawasan Internal (Ukuran Dewan Komisaris Dan Komite Audit) Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017).” *Bisnis Dan Akuntansi* XIV, no. 2 (2020): 1–10.

Sabatini, Kalvarina, and Putu Sudana. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi.” *Akuntansi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 56–69.

Sari, Citra Mulya. “PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP LABA BANK SYARIAH.” *Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 34–67.

Sari, Florentina Widita. “Pengaruh Komite Audit Terhadap Persistensi Laba.” *Accounting and Economic* 1, no. 1 (2020): 76–92.

Setiawan, Putu Ery, and I Made Pande Dwiana Putra. “Keputusan Pemilihan Strategi Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Mengalami Financial Distress Di Indonesia.” *JIAB* 14, no. 2 (2019): 196–207.

Setyani, Nur Hidayati. “IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Economica* II (2012): 43–56.

Sulistyoningsih, Novy, and Nur Fadjrih Asyik. “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP MANAJEMEN LABA.” *Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 3 (2019): 2–20.

Sunardi, Nardi. “Kesehatan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR).” *SEKURITAS* 3, no. 2 (2020): 132–47.

Suryadi, Nanda, Riri Mayliza, and Ismail Ritonga. “PENGARUH INFLASI, BIAYA

OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), DAN PANGSA PASAR TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PRIODE 2012-2018.” *Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 1–10.

Sutrisno, Niantoro, Evan Jaelani, and Rina Wijaya. “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada PT. Kiyokuni High Precision Automotive Indonesia).” *JAB* 6, no. 02 (2020): 88–97.

Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. “Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah).” *Islamic Economics* 2, no. 2 (2020): 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>.

Wau, Nicholas Yawada Zocho, Anita Nopiyanti, and Lidya Primta Surbakti. “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEAHLIAN KOMITE AUDIT, DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT.” *Prosiding Biema* 1 (2020): 807–19.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Perhitungan Discretionary Accruals

$$\text{TACit} = \text{Nit} - \text{CFOit}$$

NO	KODE	BANK UMUM SYARIAH	TAHUN	Nit (LABA BERSIH)	CFOit (Arus kas dari kegiatan operasi)	TACit
1	BAS	Bank Aceh Syariah	2016	246.588.930.749	1.672.577.382.756	-1.425.988.452.007
2	BAS	Bank Aceh Syariah	2017	433.577.430.761	10.787.462.708.792	-10.353.885.278.031
3	BAS	Bank Aceh Syariah	2018	439.432.672.027	1.089.517.014.202	-650.084.342.175
4	BAS	Bank Aceh Syariah	2019	452.326.571.475	2.225.775.672.734	-1.773.449.101.259
5	NTBS	Nusa Tenggara Barat	2016	228.252.022.358	1.105.819.980.506	-877.567.958.148
6	NTBS	Nusa Tenggara Barat	2017	146.513.706.718	832.956.542.034	-686.442.835.316
7	NTBS	Nusa Tenggara Barat	2018	38.418.711.230	711.408.938.950	-672.990.227.720
8	NTBS	Nusa Tenggara Barat	2019	163.249.445.263	128.141.099.558	35.108.345.705
9	BMI	Bank Muamalat Indonesia	2016	80.511.090.000	1.467.126.539.000	-1.386.615.449.000
10	BMI	Bank Muamalat Indonesia	2017	26.115.563.000	371.971.548.000	-345.855.985.000
11	BMI	Bank Muamalat Indonesia	2018	46.002.044.000	797.328.598.000	-751.326.554.000
12	BMI	Bank Muamalat Indonesia	2019	16.326.331.000	9.669.806.000	6.656.525.000
13	BVS	Bank Victoria Syariah	2016	-18.473.887.306	8.868.938.085	-27.342.825.391
14	BVS	Bank Victoria Syariah	2017	4.593.488.063	200.730.939.348	-196.137.451.285
15	BVS	Bank Victoria Syariah	2018	4.974.143.395	76.624.970.645	-71.650.827.250
16	BVS	Bank Victoria Syariah	2019	913331756	62087507645	-61174175889
17	BRIS	Bank Rakyat Indonesia	2016	170.209.000.000	652.133.000.000	-481.924.000.000
18	BRIS	Bank Rakyat Indonesia	2017	101.091.000.000	3.993.431.000.000	-3.892.340.000.000
19	BRIS	Bank Rakyat Indonesia	2018	106.600.000.000	644.983.000.000	-538.383.000.000
20	BRIS	Bank Rakyat Indonesia	2019	74.016.000.000	-200.219.000.000	274.235.000.000
21	BJBS	Bank Jabar Banten	2016	-414.714.205.000	771.721.000.000	-1.186.435.205.000
22	BJBS	Bank Jabar Banten	2017	-383.427.549.000	260.680.154.000	-644.107.703.000
23	BJBS	Bank Jabar Banten	2018	16.897.272.000	-1.191.381.586.000	1.208.278.858.000
24	BJBS	Bank Jabar Banten	2019	15.398.923.000	-273.614.499.000	289.013.422.000
25	BNIS	Bank Negara Indonesia	2016	277.375.000.000	2.332.571.000.000	-2.055.196.000.000
26	BNIS	Bank Negara Indonesia	2017	306.686.000.000	2.518.837.000.000	-2.212.151.000.000
27	BNIS	Bank Negara Indonesia	2018	416.080.000.000	2.283.305.000.000	-1.867.225.000.000
28	BNIS	Bank Negara Indonesia	2019	603.153.000.000	4.822.493.000.000	-4.219.340.000.000
29	BSM	Bank Syariah Mandiri	2016	325.413.775.831	1.031.513.169.147	-706.099.393.316
30	BSM	Bank Syariah Mandiri	2017	365.166.000.000	6.191.608.000.000	-5.826.442.000.000
31	BSM	Bank Syariah Mandiri	2018	605.213.000.000	4.699.431.000.000	-4.094.218.000.000
32	BSM	Bank Syariah Mandiri	2019	605.213.000.000	4.699.431.000.000	-4.094.218.000.000
33	BMSI	Bank Mega Syariah	2016	110.729.286.000	-59.285.874.000	170.015.160.000
34	BMSI	Bank Mega Syariah	2017	72.555.165.000	857.690.703.000	-785.135.538.000
35	BMSI	Bank Mega Syariah	2018	46.577.070.000	-177.626.292.000	224.203.362.000
36	BMSI	Bank Mega Syariah	2019	49.150.923.000	-233.631.374.000	282.782.297.000
37	PBS	Bank Panin Syariah	2016	19.540.914.000	-263.291.007.000	282.831.921.000

38	PBS	Bank Panin Syariah	2017	-968.851.297.000	258.337.781.000	-1.227.189.078.000
39	PBS	Bank Panin Syariah	2018	20.788.229.000	-1.356.059.085.000	1.376.847.314.000
40	PBS	Bank Panin Syariah	2019	13.237.011.000	80.647.418.000	-67.410.407.000
41	BSB	Bank Syariah Bukopin	2016	32.709.937.326	-78.422.521.859	111.132.459.185
42	BSB	Bank Syariah Bukopin	2017	1.648.071.412	570.313.706.195	-568.665.634.783
43	BSB	Bank Syariah Bukopin	2018	2.245.096.221	-314.224.895.818	316.469.992.039
44	BSB	Bank Syariah Bukopin	2019	1.729.418.800	637.246.613	1.092.172.187
45	BCAS	Bank Central Asia	2016	36.816.335.736	616.704.439.342	-579.888.103.606
46	BCAS	Bank Central Asia	2017	47.860.237.199	172.570.473.213	-124.710.236.014
47	BCAS	Bank Central Asia	2018	58.367.069.139	-129.343.099.495	187.710.168.634
48	BCAS	Bank Central Asia	2019	67.193.529.264	-760.157.491.706	827.351.020.970
49	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan	2016	412.495.000.000	704.349.000.000	-291.854.000.000
50	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan	2017	670.182.000.000	370.736.000.000	299.446.000.000
51	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan	2018	965.311.000.000	676.717.000.000	288.594.000.000
52	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan	2019	1.399.634.000.000	524.453.000.000	875.181.000.000
53		Bank Net Indonesia	2016	-163.738.000.000	108.004.000.000	-271.742.000.000
54		Bank Net Indonesia	2017	-9.785.000.000	163.210.000.000	-172.995.000.000
55		Bank Net Indonesia	2018	-64.720.000.000	-283.631.000.000	218.911.000.000
56		Bank Net Indonesia	2019	77.304.000.000	114.037.000.000	-36.733.000.000

LAMPIRAN 2

Perhitungan Discretionary Accruals

$$TAC_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

KODE	TAHUN	$\beta_1*(1/A_{it-1})$	$\beta_2*(\Delta REV/A_{it-1})$	$\beta_3*(PPE_{it}/A_{it-1})$	TACit/Ait-1
BAS	2016	-0,002171636	0,001687909	0,016215831	0,015732105
BAS	2017	-0,002152051	-0,002908249	0,016520178	0,011459877
BAS	2018	-0,001785367	-0,001122976	0,018547706	0,015639362
BAS	2019	-0,001748017	0,000609253	0,018793874	0,017655109
NTBS	2016	-0,006606351	-0,000819013	0,02359848	0,016173116
NTBS	2017	-0,005277885	0,000223493	0,021333853	0,016279461
NTBS	2018	-0,004554259	0,00363303	0,018245896	0,017324667
NTBS	2019	-0,005735582	-0,005680209	0,024934224	0,013518433
BMI	2016	-0,000706516	0,000946838	0,073648126	0,073888449

BMI	2017	-0,000723666	0,000297186	0,075872692	0,075446212
BMI	2018	-0,00065434	0,000357873	0,086801917	0,08650545
BMI	2019	-0,000705446	0,000608803	0,087298237	0,087201593
BVS	2016	-0,029269735	0,000139841	0,001926856	-0,027203038
BVS	2017	-0,02484073	-0,000959825	0,001400938	-0,024399617
BVS	2018	-0,020153993	-0,000298178	0,001080478	-0,019371692
BVS	2019	-0,189888907	0,003850258	0,006105728	-0,179932921
BRIS	2016	-0,00166613	-0,000760694	0,009270409	0,006843585
BRIS	2017	-0,001458102	-0,000150423	0,010251496	0,008642972
BRIS	2018	-0,001279848	-0,000604553	0,011198513	0,009314112
BRIS	2019	-0,001066058	-0,000800504	0,009437648	0,007571087
BJBS	2016	-0,006268781	-0,016651852	0,042351063	0,01943043
BJBS	2017	-0,00542497	0,014443749	0,061631532	0,070650312
BJBS	2018	-0,005233738	-3,28059E-05	0,065272373	0,06000583
BJBS	2019	-0,005988436	0,00048133	0,074392726	0,06888562
BNIS	2016	-0,001753902	-0,001192807	0,014871089	0,011924379
BNIS	2017	-0,001425814	-0,001112633	0,013000482	0,010462035
BNIS	2018	-0,001159331	-0,001013067	0,015918661	0,013746264
BNIS	2019	-0,000983488	-0,001211217	0,020533004	0,018338299
BSM	2016	-0,000573695	-0,000694794	0,022062451	0,020793962
BSM	2017	-0,000512113	-0,000823524	0,017837254	0,016501617
BSM	2018	-0,000459202	-0,000492404	0,01786548	0,016913874
BSM	2019	-0,000459202	-0,000492404	0,01786548	0,016913874
BMSI	2016	-0,00726116	0,003918098	0,093090484	0,089747422
BMSI	2017	-0,006580138	0,005309114	0,082684206	0,081413182
BMSI	2018	-0,005739127	-0,000157111	0,076403896	0,070507659
BMSI	2019	-0,005502843	-0,000646427	0,069847723	0,063698453
PBS	2016	-0,005658734	0,000228302	0,018811307	0,013380875
PBS	2017	-0,004609603	-0,001037881	0,017344055	0,01169657
PBS	2018	-0,004678347	0,001514265	0,016461408	0,013297326
PBS	2019	-0,004602722	-0,000696139	0,017851772	0,012552912
BSB	2016	-0,006928038	-0,001196694	0,037990196	0,029865464
BSB	2017	-0,005850078	0,000693547	0,052913896	0,047757365
BSB	2018	-0,005633448	9,08867E-05	0,070281513	0,064738951
BSB	2019	-0,006379249	0,000585561	0,067298805	0,061505117
BCAS	2016	-0,009281526	-0,000962741	0,018602741	0,008358475

BCAS	2017	-0,008081249	-0,000434855	0,025977329	0,017461226
BCAS	2018	-0,006772279	-0,00040944	0,033791693	0,026609974
BCAS	2019	-0,00571499	-0,001375693	0,033380049	0,026289366
BTPNS	2016	-0,007769283	-0,011070832	0,057203206	0,038363091
BTPNS	2017	-0,005512608	-0,007916785	0,041443051	0,028013659
BTPNS	2018	-0,00440896	-0,005323914	0,030800579	0,021067705
BTPNS	2019	-0,003353253	-0,006610176	0,02776464	0,017801211
	2016	-0,023155808	0,002975964	0,021417179	0,001237335
	2017	-0,030021669	-0,000720634	0,027717702	-0,003024601
	2018	-0,031647241	0,002173916	0,028138114	-0,001335211
	2019	-0,060991097	0,001433357	0,047564792	-0,011992948

LAMPIRAN 3

Perhitungan Discretionary Accruals

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1} + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

KODE	TAHUN	$\beta_1*(1/A_{it-1})$	$\beta_2*(\Delta REV/A_{it-1} - \Delta REC/A_{it-1})$	$\beta_3*(PPE_{it}/A_{it-1})$	NDA _{it}
BAS	2016	-0,002171636	0,002246737	0,016215831	0,016290932
BAS	2017	-0,002152051	5,8217E-05	0,016520178	0,014426343
BAS	2018	-0,001785367	-0,000607917	0,018547706	0,016154422
BAS	2019	-0,001748017	0,004055084	0,018793874	0,021100941
NTBS	2016	-0,006606351	0,006510208	0,02359848	0,023502337
NTBS	2017	-0,005277885	0,003635482	0,021333853	0,01969145
NTBS	2018	-0,004554259	-0,006984806	0,018245896	0,006706831
NTBS	2019	-0,005735582	-0,027024682	0,024934224	-0,00782604
BMI	2016	-0,000706516	0,000221319	0,073648126	0,073162929
BMI	2017	-0,000723666	0,004419389	0,075872692	0,079568415
BMI	2018	-0,00065434	-0,005730074	0,086801917	0,080417504
BMI	2019	-0,000705446	-0,001847922	0,087298237	0,084744869

BVS	2016	-0,029269735	-0,004290446	0,001926856	-0,031633325
BVS	2017	-0,02484073	0,003851288	0,001400938	-0,019588504
BVS	2018	-0,020153993	-0,004040142	0,001080478	-0,023113656
BVS	2019	-0,189888907	-0,006222971	0,006105728	-0,19000615
BRIS	2016	-0,00166613	0,001988026	0,009270409	0,009592305
BRIS	2017	-0,001458102	-0,000300929	0,010251496	0,008492465
BRIS	2018	-0,001279848	0,002077015	0,011198513	0,011995679
BRIS	2019	-0,001066058	0,003700594	0,009437648	0,012072185
BJBS	2016	-0,006268781	-0,016055064	0,042351063	0,020027218
BJBS	2017	-0,00542497	0,011931584	0,061631532	0,068138147
BJBS	2018	-0,005233738	-0,003407571	0,065272373	0,056631065
BJBS	2019	-0,005988436	0,004676644	0,074392726	0,073080934
BNIS	2016	-0,001753902	0,005260389	0,014871089	0,018377576
BNIS	2017	-0,001425814	0,003326712	0,013000482	0,01490138
BNIS	2018	-0,001159331	0,003023047	0,015918661	0,017782377
BNIS	2019	-0,000983488	0,001042579	0,020533004	0,020592095
BSM	2016	-0,000573695	0,001074985	0,022062451	0,022563741
BSM	2017	-0,000512113	-0,000879992	0,017837254	0,016445148
BSM	2018	-0,000459202	0,001898313	0,01786548	0,019304591
BSM	2019	-0,000459202	0,001898313	0,01786548	0,019304591
BMSI	2016	-0,00726116	0,008772722	0,093090484	0,094602046
BMSI	2017	-0,006580138	-0,000179069	0,082684206	0,075924999
BMSI	2018	-0,005739127	-0,000837931	0,076403896	0,069826839
BMSI	2019	-0,005502843	0,001012621	0,069847723	0,065357501
PBS	2016	-0,005658734	0,006639589	0,018811307	0,019792163
PBS	2017	-0,004609603	-0,001505391	0,017344055	0,011229061
PBS	2018	-0,004678347	-0,004102392	0,016461408	0,00768067
PBS	2019	-0,004602722	0,001995721	0,017851772	0,015244771
BSB	2016	-0,006928038	-0,000788845	0,037990196	0,030273313
BSB	2017	-0,005850078	-0,006071244	0,052913896	0,040992574
BSB	2018	-0,005633448	-0,002084275	0,070281513	0,062563789
BSB	2019	-0,006379249	0,000971144	0,067298805	0,0618907
BCAS	2016	-0,009281526	-0,000304008	0,018602741	0,009017208

BCAS	2017	-0,008081249	0,001395551	0,025977329	0,019291631
BCAS	2018	-0,006772279	0,001483572	0,033791693	0,028502986
BCAS	2019	-0,00571499	-0,00262409	0,033380049	0,025040969
BTPNS	2016	-0,007769283	0,011811629	0,057203206	0,061245552
BTPNS	2017	-0,005512608	0,005114075	0,041443051	0,041044519
BTPNS	2018	-0,00440896	0,00654399	0,030800579	0,03293561
BTPNS	2019	-0,003353253	0,005891377	0,02776464	0,030302764
	2016	-0,023155808	-0,020354961	0,021417179	-0,022093591
	2017	-0,030021669	-0,00769177	0,027717702	-0,009995738
	2018	-0,031647241	-0,020913256	0,028138114	-0,024422383
	2019	-0,060991097	-0,007528414	0,047564792	-0,02095472

LAMPIRAN 4

Perhitungan Manajemen Laba

$$DAit = (TACit/Ait-1) - NDAit$$

KODE	TAHUN	TACit/Ait-1	NDAit	DAit= (TACit/Ait-1) - NDAit
BAS	2016	0,015732105	0,016290932	-0,000558827
BAS	2017	0,011459877	0,014426343	-0,002966466
BAS	2018	0,015639362	0,016154422	-0,00051506
BAS	2019	0,017655109	0,021100941	-0,003445831
NTBS	2016	0,016173116	0,023502337	-0,007329221
NTBS	2017	0,016279461	0,01969145	-0,003411989
NTBS	2018	0,017324667	0,006706831	0,010617836
NTBS	2019	0,013518433	-0,00782604	0,021344473
BMI	2016	0,073888449	0,073162929	0,00072552
BMI	2017	0,075446212	0,079568415	-0,004122203
BMI	2018	0,08650545	0,080417504	0,006087946
BMI	2019	0,087201593	0,084744869	0,002456724
BVS	2016	-0,027203038	-0,031633325	0,004430287
BVS	2017	-0,024399617	-0,019588504	-0,004811113
BVS	2018	-0,019371692	-0,023113656	0,003741964
BVS	2019	-0,179932921	-0,19000615	0,010073229
BRIS	2016	0,006843585	0,009592305	-0,00274872

BRIS	2017	0,008642972	0,008492465	0,000150506
BRIS	2018	0,009314112	0,011995679	-0,002681568
BRIS	2019	0,007571087	0,012072185	-0,004501098
BJBS	2016	0,01943043	0,020027218	-0,000596788
BJBS	2017	0,070650312	0,068138147	0,002512164
BJBS	2018	0,06000583	0,056631065	0,003374765
BJBS	2019	0,06888562	0,073080934	-0,004195314
BNIS	2016	0,011924379	0,018377576	-0,006453196
BNIS	2017	0,010462035	0,01490138	-0,004439345
BNIS	2018	0,013746264	0,017782377	-0,004036113
BNIS	2019	0,018338299	0,020592095	-0,002253796
BSM	2016	0,020793962	0,022563741	-0,001769779
BSM	2017	0,016501617	0,016445148	5,64684E-05
BSM	2018	0,016913874	0,019304591	-0,002390717
BSM	2019	0,016913874	0,019304591	-0,002390717
BMSI	2016	0,089747422	0,094602046	-0,004854625
BMSI	2017	0,081413182	0,075924999	0,005488183
BMSI	2018	0,070507659	0,069826839	0,00068082
BMSI	2019	0,063698453	0,065357501	-0,001659048
PBS	2016	0,013380875	0,019792163	-0,006411288
PBS	2017	0,01169657	0,011229061	0,000467509
PBS	2018	0,013297326	0,00768067	0,005616656
PBS	2019	0,012552912	0,015244771	-0,002691859
BSB	2016	0,029865464	0,030273313	-0,000407849
BSB	2017	0,047757365	0,040992574	0,006764791
BSB	2018	0,064738951	0,062563789	0,002175162
BSB	2019	0,061505117	0,0618907	-0,000385583
BCAS	2016	0,008358475	0,009017208	-0,000658733
BCAS	2017	0,017461226	0,019291631	-0,001830405
BCAS	2018	0,026609974	0,028502986	-0,001893011
BCAS	2019	0,026289366	0,025040969	0,001248397
BTPNS	2016	0,038363091	0,061245552	-0,022882461
BTPNS	2017	0,028013659	0,041044519	-0,01303086
BTPNS	2018	0,021067705	0,03293561	-0,011867904
BTPNS	2019	0,017801211	0,030302764	-0,012501553
	2016	0,001237335	-0,022093591	0,023330926
	2017	-0,003024601	-0,009995738	0,006971136
	2018	-0,001335211	-0,024422383	0,023087172
	2019	-0,011992948	-0,02095472	0,008961771

LAMPIRAN 5

Data Input Regresi Linier Dewan Komisaris, Komite Audit, DPS, dan Manajemen Laba

No	BUS	Tahun	DK (X1)	KA (X2)	DPS (X3)	ML (Y)
1	ACEH	2016	3	3	2	-0,000558827
		2017	3	3	2	-0,002966466
		2018	3	3	2	-0,00051506
		2019	3	3	2	-0,003445831
2	NTB	2016	4	6	3	-0,007329221
		2017	4	6	2	-0,003411989
		2018	3	4	2	0,010617836
		2019	3	5	2	0,021344473
3	MUAMALAT	2016	4	4	3	0,00072552
		2017	5	4	3	-0,004122203
		2018	5	3	3	0,006087946
		2019	5	3	2	0,002456724
4	VICTORIA	2016	3	3	2	0,004430287
		2017	3	3	2	-0,004811113
		2018	3	4	2	0,003741964
		2019	3	4	2	0,010073229
5	BRI	2016	5	5	2	-0,00274872
		2017	4	5	2	0,000150506
		2018	4	6	2	-0,002681568
		2019	4	5	2	-0,004501098
6	BJB	2016	4	4	3	-0,000596788
		2017	4	4	3	0,002512164
		2018	3	5	3	0,003374765
		2019	3	5	2	-0,004195314
7	BNI	2016	4	5	2	-0,006453196
		2017	4	4	2	-0,004439345
		2018	4	3	2	-0,004036113
		2019	4	6	2	-0,002253796
8	MANDIRI	2016	5	6	3	-0,001769779
		2017	4	6	3	5,64684E-05
		2018	3	5	3	-0,002390717
		2019	3	4	3	-0,002390717
9	MEGA	2016	3	3	3	-0,004854625
		2017	3	3	2	0,005488183
		2018	3	3	2	0,00068082
		2019	3	3	2	-0,001659048
10	PANIN	2016	4	3	2	-0,006411288
		2017	4	3	2	0,000467509
		2018	3	3	2	0,005616656
		2019	3	3	2	-0,002691859

11	BUKOPIN	2016	4	3	2	-0,000407849
		2017	4	3	2	0,006764791
		2018	4	2	2	0,002175162
		2019	3	3	2	-0,000385583
12	BCA	2016	3	3	2	-0,000658733
		2017	3	3	2	-0,001830405
		2018	3	3	2	-0,001893011
		2019	3	4	2	0,001248397
13	BTPN	2016	3	5	2	-0,022882461
		2017	4	4	2	-0,01303086
		2018	4	4	2	-0,011867904
		2019	4	4	2	-0,012501553
14	NET	2016	3	4	2	0,023330926
		2017	3	4	2	0,006971136
		2018	3	4	2	0,023087172
		2019	3	4	2	0,008961771

LAMPIRAN 6

Daftar Sample Penelitian Bank Umum Syariah 2016-2020

No	Nama Bank	Website
1	PT. Bank Aceh Syariah	www.bankaceh.co.id
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	www.bankntbsyariah.co.id
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
4	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
5	PT. Bank BRI Syariah	www.bankbsi.co.id
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
7	PT. Bank BNI Syariah	www.bankbsi.co.id
8	PT. Bank Syariah Mandiri	www.bankbsi.co.id
9	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
11	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
12	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	www.btpnsyariah.com
14	PT. Bank Net Syariah	www.banknetsyariah.co.id

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020

LAMPIRAN 7

Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	56	3,00	5,00	3,5536	,65836
KA	56	2,00	6,00	3,9286	1,04198
DPS	56	2,00	3,00	2,2143	,41404
ML	56	-,02	,02	,0001	,00790
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

Hasil Uji Regresi Logistik

1. Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Tess*)

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4,211	7	,755

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

2. Hasil Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	36,233	-1,643
	2	33,796	-2,179
	3	33,699	-2,314
	4	33,699	-2,322
	5	33,699	-2,322

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 33,699

c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Constant	Coefficients		
				Dewan Komisaris	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
Step 1	1	32,648	-1,340	-,440	,379	-,102
	2	26,211	-,994	-1,197	,885	-,277
	3	23,494	,514	-2,292	1,454	-,543
	4	22,672	2,055	-3,255	1,898	-,795
	5	22,588	2,676	-3,659	2,088	-,907
	6	22,586	2,742	-3,707	2,112	-,921
	7	22,586	2,742	-3,708	2,112	-,921

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 33,699

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	22,586 ^a	,180	,398

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

4. Hasil Pengujian Secara Simultan

Omnibus Tests of Model Coefficients

Step		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	11,112	3	,011
	Block	11,112	3	,011
	Model	11,112	3	,011

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

5. Hasil Pengujian Secara Parsial

Variables in the Equation

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
1 ^a	Dewan Komisaris	-3,708	1,812	4,187	1	,041	,025	,001	,855
	Komite Audit	2,112	,903	5,467	1	,019	8,268	1,407	48,573
	Dewan Pengawas Syariah	-,921	1,410	,427	1	,514	,398	,025	6,307
	Constant	2,742	5,097	,289	1	,591	15,523		

a. Variable(s) entered on step 1: Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah.

Sumber: Data sekunder diolah (output SPSS 25)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Tiyansi Kurnia Asih
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 26 Februari 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Suruhan RT 01 RW 02, Karangwuni, Weru, Sukoharjo
 Status : Belum Menikah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 No. Hp : 089697496639
 E-mail : tiyansikurniasih@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2004 – 2009 : SD Negeri 01 Karangwuni
 2010 – 2013 : SMP Negeri 02 Weru
 2014 – 2016 : SMA Negeri 01 Weru
 2017 – 2021 : S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Pradani Dewan Ambalan Arjuna Srikandi SMA Negeri 01 Weru pada tahun 2015-2016.
2. Anggota Forum Komunikasi Remaja Islam (FKRI) SMA Negeri 01 Weru pada tahun 2016.
3. Anggota Racana Walisongo UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017-2018.
4. Anggota UKM Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz (JQH) eL-Fasya eL-Febi's UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017-2018.
5. Dewan Kerja Ranting (DKR) Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2019.

Hormat saya,

Tiyansi Kurnia Asih

NIM. 1705046102